



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1811, 2018

BKN. Juklak Jabatan Fungsional Inspektur Tambang. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5258);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1834);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG.

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Inspektur Tambang, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1247K/70/MEM/2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.
- (2) Keputusan pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Inspektur Tambang, karena:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1247K/70/MEM/2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Badan ini, Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1247K/70/MEM/2002 dan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai pembinaan kepegawaian Jabatan Fungsional inspektur Tambang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan untuk menjamin pelaksanaan serta pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, perlu ditetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.

B. TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat yang secara fungsional membidangi kepegawaian dan pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Inspektur Tambang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
7. Pejabat Fungsional Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut Inspektur Tambang adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi kegiatan Inspeksi Tambang dan Pengawasan Keteknikan.
8. Inspeksi Tambang adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan kegiatan usaha pertambangan melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, pengujian, pemeriksaan, evaluasi dan analisis data dalam rangka pengawasan keteknikan dan lingkungan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan usaha jasa pertambangan, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
9. Pengawasan Keteknikan adalah kegiatan pengawasan terhadap aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan,

keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.

10. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Inspektur Tambang.
11. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Inspektur Tambang dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Tambang sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
14. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian melalui identifikasi dan deskripsi, analisis permasalahan dan saran-saran pemecahannya yang disusun oleh Inspektur Tambang baik perorangan atau kelompok di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
15. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

II. TUGAS JABATAN, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

A. TUGAS JABATAN

Tugas jabatan Inspektur Tambang yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian, dan penelaahan aspek teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada

usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

B. JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

1. Jabatan Fungsional Inspektur Tambang merupakan Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
2. Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
 - a. Inspektur Tambang Ahli Pertama;
 - b. Inspektur Tambang Ahli Muda;
 - c. Inspektur Tambang Ahli Madya; dan
 - d. Inspektur Tambang Ahli Utama.
3. Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. Inspektur Tambang Ahli Pertama:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Inspektur Tambang Ahli Muda:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Inspektur Tambang Ahli Madya:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Inspektur Tambang Ahli Utama:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
4. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Febiyanto Darmawan, ST., NIP. 198805102012031001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur

Tambang, maka penilaian untuk menetapkan Angka Kredit dinilai dari unsur:

- a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 100 Angka Kredit.
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Inspektur Tambang sebesar 2 Angka Kredit.
- c. Pelaksanaan tugas di bidang inspeksi tambang, sebesar 56 Angka Kredit.

Sehingga jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditetapkan sebesar 158.

Dengan demikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr. Febiyanto Darmawan, ST., sesuai dengan jenjang pangkat, golongan ruang yang dimilikinya yakni Inspektur Tambang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

5. Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 3.

Contoh:

Sdr. Ramdan Ali, S.T. M.T., NIP. 19747051998031001, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, jabatan Kepala Seksi Konservasi Mineral. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai, Sdr. Ramdan Ali, S.T. M.T, memperoleh 375 Angka Kredit, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit;
- b. Diklat fungsional/teknis yang mendukung tugas Inspektur Tambang sebesar 10 Angka Kredit;
- c. Pelaksanaan tugas di bidang inspeksi tambang, sebesar 165 Angka Kredit;
- d. Pengembangan profesi sebesar 20 Angka Kredit;
- e. Penunjang tugas Inspektur Tambang sebesar 30 Angka Kredit.

Mengingat Angka Kredit Kumulatif yang diperoleh Sdr. Ramdan Ali, S.T., M.T, sebesar 375. Maka penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan pangkat dan golongan ruang

yang dimiliki yaitu Inspektur Tambang Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

III. UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

1. Unsur kegiatan tugas jabatan Inspektur Tambang yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
2. Unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. inspeksi tambang; dan
 - c. pengembangan profesi.
3. Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri atas:
 - a. pendidikan, meliputi:
 - 1) pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan
 - 2) pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - b. inspeksi tambang, meliputi:
 - 1) perencanaan inspeksi tambang;
 - 2) penyusunan program inspeksi tambang;
 - 3) pelaksanaan inspeksi tambang;
 - 4) pemeriksaan atas kecelakaan atau kejadian berbahaya atau kasus lingkungan atau bencana akibat kegiatan usaha pertambangan;
 - 5) pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian rencana, laporan teknis, data studi, dan/atau kajian teknis untuk pelayanan teknis;
 - 6) pembuatan sketsa, pelaporan dan penyampaian laporan hasil inspeksi tambang; dan
 - 7) pengembangan metode dan teknologi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
 - c. pengembangan profesi, meliputi:

- 1) pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - 2) penyusunan buku pedoman atau ketentuan pelaksanaan atau pedoman teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan
 - 3) penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.
4. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - d. keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/internasional;
 - e. keanggotaan dalam Tim Penilai;
 - f. perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
 - g. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

IV. URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN MASING-MASING JENJANG JABATAN

A. INSPEKTUR TAMBANG AHLI PERTAMA

Uraian kegiatan tugas jabatan Inspektur Tambang Ahli Pertama, meliputi:

1. menelaah data objek inspeksi dalam rangka persiapan inspeksi rutin;
2. menyiapkan peralatan inspeksi dalam rangka persiapan inspeksi rutin;
3. melaksanakan inspeksi penanganan contoh (*sample*) hasil kegiatan eksplorasi;
4. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada kegiatan eksplorasi;
5. melaksanakan inspeksi pengamanan lubang hasil pemboran pada kegiatan eksplorasi;
6. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada kegiatan eksplorasi;
7. melaksanakan inspeksi lingkungan kerja pada kegiatan eksplorasi;

8. melaksanakan inspeksi peralatan eksplorasi;
9. melaksanakan inspeksi penanganan erosi dan sedimentasi pada kegiatan eksplorasi;
10. melaksanakan inspeksi pengelolaan air tambang pada kegiatan eksplorasi;
11. melaksanakan inspeksi penanganan limbah bahan beracun dan berbahaya pada kegiatan eksplorasi;
12. melaksanakan inspeksi reklamasi pada kegiatan eksplorasi;
13. melaksanakan inspeksi pelaksanaan kompilasi data wilayah dan persiapan teknis, serta evaluasi laporan pengukuran dan pemasangan Tanda Batas WIUP dan WIUPK;
14. melaksanakan inspeksi pemasangan Tanda Batas WIUP/WIUPK;
15. melaksanakan inspeksi terhadap pemeliharaan dan perawatan Tanda Batas WIUP/WIUPK;
16. melaksanakan inspeksi kesesuaian lokasi dan konstruksi fasilitas penambangan/pengangkutan/fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
17. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi tenaga pelaksana konstruksi;
18. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada kegiatan konstruksi;
19. melaksanakan inspeksi sistem pengangkutan/penggunaan peralatan tambang bawah tanah;
20. melaksanakan inspeksi pengolahan di dalam tambang bawah tanah;
21. melaksanakan inspeksi penyimpanan sementara bijih atau batubara di dalam tambang bawah tanah;
22. melaksanakan inspeksi cadangan tidak tertambang pada tambang bawah tanah;
23. melaksanakan inspeksi pemuatan dan/atau *draw point* pada tambang bawah tanah;
24. melaksanakan inspeksi terowongan (*raise, drift, cross cut*);
25. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang bawah tanah;
26. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang bawah tanah;
27. melaksanakan inspeksi peralatan tambang bawah tanah;
28. melaksanakan inspeksi ruang fasilitas bawah tanah;

29. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada tambang bawah tanah;
30. melaksanakan inspeksi penyimpanan bahan beracun dan berbahaya pada tambang bawah tanah;
31. melaksanakan inspeksi jalan tambang pada tambang permukaan;
32. melaksanakan inspeksi penggalian dan pemuatan mineral/batubara pada tambang permukaan;
33. melaksanakan inspeksi lereng tambang pada tambang permukaan;
34. melaksanakan inspeksi kemajuan operasi tambang pada tambang permukaan;
35. melaksanakan inspeksi pemantauan kestabilan lereng tambang dan timbunan pada tambang permukaan;
36. melaksanakan inspeksi sistem penyaliran air tambang pada tambang permukaan;
37. melaksanakan inspeksi peralatan tambang pada tambang permukaan;
38. melaksanakan inspeksi pendataan cadangan tidak tertambang pada tambang permukaan;
39. melaksanakan inspeksi penyimpanan sementara mineral/batubara pada tambang permukaan;
40. melaksanakan inspeksi penanganan batubara swabakar pada tambang permukaan;
41. melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang permukaan;
42. melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang permukaan;
43. melaksanakan inspeksi penanganan tanah/batuan penutup pada tambang permukaan;
44. melaksanakan inspeksi pengelolaan air/*drainase* pada tambang permukaan;
45. melaksanakan inspeksi penanganan lahan bekas tambang permukaan;
46. melaksanakan inspeksi penanganan air asam tambang pada tambang permukaan;
47. melaksanakan inspeksi reklamasi dan revegetasi pada tambang permukaan;

48. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang permukaan;
49. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan;
50. Melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang pada tambang permukaan;
51. melaksanakan inspeksi lingkungan kerja pada tambang permukaan;
52. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja;
53. melaksanakan inspeksi sistem penyaliran air tambang pada tambang semprot;
54. melaksanakan inspeksi peralatan tambang pada tambang semprot;
55. melaksanakan inspeksi kemajuan tambang semprot;
56. melaksanakan inspeksi perolehan atau *recovery* konsentrator/ pencucian pada tambang semprot;
57. melaksanakan inspeksi cadangan tidak tertambang pada tambang semprot;
58. melaksanakan inspeksi penyimpanan sementara mineral pada tambang semprot;
59. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang semprot;
60. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang semprot;
61. melaksanakan inspeksi jalan tambang pada tambang semprot;
62. melaksanakan inspeksi kolong kerja pada tambang semprot;
63. melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang semprot;
64. melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup pada tambang semprot;
65. melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang semprot;
66. melaksanakan inspeksi penanganan air kerja pada tambang semprot;
67. melaksanakan inspeksi tinggi muka air tanah pada tambang semprot;
68. melaksanakan inspeksi reklamasi dan revegetasi pada tambang semprot;

69. melaksanakan inspeksi kemajuan penambangan menggunakan kapal keruk/kapal isap produksi;
70. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada kapal keruk/kapal isap produksi;
71. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada kapal keruk/kapal isap produksi;
72. melaksanakan inspeksi penanganan Bahan Bakar Cair pada kapal keruk/kapal isap produksi;
73. melaksanakan inspeksi tangki ponton dan pompa pada kapal keruk/kapal isap produksi;
74. melaksanakan inspeksi alat navigasi pada kapal keruk/kapal isap produksi;
75. melaksanakan inspeksi komunikasi pada kapal keruk/kapal isap produksi;
76. melaksanakan inspeksi bangunan atas kapal keruk pada kapal keruk/kapal isap produksi;
77. melaksanakan inspeksi kelaikan pesawat angkat pada kapal keruk/kapal isap produksi;
78. melaksanakan inspeksi alat angkut orang (*boat*) pada kapal keruk/kapal isap produksi;
79. melaksanakan inspeksi kelaikan mesin kapal keruk/kapal isap produksi;
80. melaksanakan inspeksi penanganan ceceran oli/bahan bakar minyak pada kapal keruk/kapal isap produksi;
81. melaksanakan inspeksi reklamasi pada kapal keruk/kapal isap produksi;
82. melaksanakan inspeksi sistem drainase pada fasilitas permukaan;
83. melaksanakan inspeksi konstruksi pada fasilitas permukaan;
84. melaksanakan inspeksi konstruksi tempat penyimpanan tailing (*Tailing Storage Facility*) pada fasilitas permukaan;
85. melaksanakan inspeksi penanganan batubara swabakar pada *stockpile* pada fasilitas permukaan;
86. melaksanakan inspeksi poliklinik/Rumah Sakit pada fasilitas permukaan;
87. melaksanakan inspeksi penyediaan air bersih pada fasilitas permukaan;
88. melaksanakan inspeksi bengkel pada fasilitas permukaan;

89. melaksanakan inspeksi gudang bahan peledak pada fasilitas permukaan;
90. melaksanakan inspeksi gudang umum pada fasilitas permukaan;
91. melaksanakan inspeksi penanganan air/*drainase* pada fasilitas permukaan;
92. melaksanakan inspeksi penanganan limbah non bahan beracun dan berbahaya pada fasilitas permukaan;
93. melaksanakan inspeksi penimbunan sampah pada fasilitas permukaan;
94. melaksanakan inspeksi kolam sedimen pada fasilitas permukaan;
95. melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu pada fasilitas permukaan;
96. melaksanakan inspeksi sarana pembibitan;
97. melaksanakan inspeksi penanganan tabung oksigen atau acetyline;
98. melaksanakan inspeksi fasilitas penimbunan bahan bakar cair;
99. melaksanakan inspeksi kelaikan dan pemeliharaan pesawat angkat;
100. melaksanakan inspeksi hunian/*camp*/kantor;
101. melaksanakan inspeksi fasilitas penimbunan/penyimpanan material penunjang kegiatan pertambangan dan barang bekas;
102. melaksanakan inspeksi sistem dan metode pengolahan dan/atau pemurnian;
103. melaksanakan inspeksi penimbunan bahan baku/mineral atau batubara (*run of mine stockpile*);
104. melaksanakan inspeksi penimbunan hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
105. melaksanakan inspeksi sistem *drainase* pabrik pengolahan dan/atau pemurnian;
106. melaksanakan inspeksi pencampuran mineral atau batubara;
107. melaksanakan inspeksi pengelolaan mineral kadar rendah atau batubara kualitas rendah;
108. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
109. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;

110. melaksanakan inspeksi lingkungan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
111. melaksanakan inspeksi kelaikan pesawat angkat pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
112. melaksanakan inspeksi pengelolaan air/drainase pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
113. melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan di pelabuhan;
114. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja di pelabuhan;
115. melaksanakan inspeksi konstruksi dermaga;
116. melaksanakan inspeksi fasilitas pemuatan di pelabuhan;
117. melaksanakan inspeksi bengkel di pelabuhan;
118. melaksanakan inspeksi pengelolaan air di pelabuhan;
119. melaksanakan inspeksi kolam pengendap di pelabuhan;
120. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan eksplorasi;
121. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang bawah tanah;
122. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang permukaan;
123. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang semprot;
124. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi;
125. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan fasilitas permukaan;
126. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan pengolahan pemurnian

127. melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan pelabuhan;
128. melaksanakan inspeksi administrasi pelaksanaan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan kompetensi Tenaga Kerja Asing (TKA) perusahaan jasa pertambangan;
129. melaksanakan inspeksi pelaksanaan program transfer keahlian dari Tenaga Kerja Asing ke Tenaga Kerja Indonesia Pendamping di perusahaan jasa pertambangan;
130. melaksanakan inspeksi penggunaan subkontraktor lokal dan tenaga kerja lokal; dan
131. melaksanakan inspeksi administrasi penunjukan, pengesahan, dan evaluasi posisi dan kompetensi Penanggung Jawab Operasional.

B. INSPEKTUR TAMBANG AHLI MUDA

Uraian kegiatan tugas jabatan Inspektur Tambang Ahli Muda, meliputi:

1. menyusun konsep dan mempresentasikan rencana inspeksi;
2. menyusun konsep program inspeksi;
3. melakukan presentasi objek inspeksi;
4. melakukan pertemuan pra-inspeksi;
5. melaksanakan inspeksi kegiatan pemetaan topografi/geologi/geoteknik;
6. melaksanakan inspeksi kegiatan penyelidikan geokimia/geofisika/pengeboran eksplorasi/pembuatan parit uji/pembuatan sumur uji;
7. melaksanakan inspeksi estimasi sumber daya dan cadangan;
8. melaksanakan inspeksi validitas data pelaporan hasil eksplorasi;
9. melaksanakan inspeksi tata cara pengukuran Titik Batas WIUP/WIUPK;
10. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kegiatan eksplorasi;
11. melaksanakan inspeksi kesiapan fasilitas keadaan darurat pada kegiatan eksplorasi;
12. melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada kegiatan eksplorasi;

13. melaksanakan inspeksi konstruksi fasilitas penambangan/ pengangkutan/ pengolahan dan/atau pemurnian;
14. melaksanakan evaluasi kemajuan operasi tambang bawah tanah;
15. melaksanakan inspeksi pillar dan penyanggaan tambang bawah tanah;
16. melaksanakan inspeksi sistem ventilasi udara tambang bawah tanah;
17. melaksanakan inspeksi kestabilan lubang bukaan tambang bawah tanah;
18. melaksanakan inspeksi kelayakan teknis sistem pengangkutan tambang bawah tanah;
19. melaksanakan inspeksi amblasan permukaan (*surface subsidence*);
20. melaksanakan inspeksi cadangan marginal pada tambang bawah tanah;
21. melaksanakan inspeksi perolehan atau *recovery* penambangan pada tambang bawah tanah;
22. melaksanakan inspeksi perolehan atau *recovery* pengangkutan pada tambang bawah tanah;
23. melaksanakan inspeksi keselamatan kerja pemboran dan peledakan pada tambang bawah tanah;
24. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang bawah tanah;
25. melaksanakan inspeksi fasilitas keadaan darurat pada tambang bawah tanah;
26. melaksanakan inspeksi kualitas udara dan sistem ventilasi pada tambang bawah tanah;
27. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang bawah tanah;
28. melaksanakan inspeksi penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun pada tambang bawah tanah;
29. melaksanakan inspeksi penanganan cadangan marginal pada tambang permukaan;
30. melaksanakan inspeksi perolehan atau *recovery* penambangan pada tambang permukaan;
31. melaksanakan inspeksi perolehan atau *recovery* pengangkutan pada tambang permukaan;

32. melaksanakan inspeksi peledakan pada tambang permukaan;
33. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang permukaan;
34. melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan;
35. melaksanakan inspeksi fasilitas keadaan darurat pada tambang permukaan;
36. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang permukaan;
37. melaksanakan inspeksi dewatering pada tambang permukaan;
38. melaksanakan inspeksi lokasi kerja tambang semprot;
39. melaksanakan inspeksi pengolahan bijih di tambang semprot;
40. melaksanakan inspeksi penanganan cadangan marginal pada tambang semprot;
41. melaksanakan inspeksi perolehan atau *recovery* penambangan pada tambang semprot;
42. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang semprot;
43. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada tambang semprot;
44. melaksanakan inspeksi bekas kolong pada tambang semprot;
45. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang semprot;
46. melaksanakan inspeksi kelayakan lokasi kerja kapal keruk/kapal isap produksi;
47. melaksanakan inspeksi peralatan tambang pada kapal keruk/kapal isap produksi;
48. melaksanakan inspeksi pengolahan bijih di kapal keruk/kapal isap produksi;
49. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kapal keruk/kapal isap produksi;
50. melaksanakan inspeksi sistem penjangkaran pada kapal keruk/kapal isap produksi;
51. melaksanakan inspeksi kestabilan kapal keruk/kapal isap produksi;
52. melaksanakan inspeksi fasilitas keadaan darurat pada kapal keruk/kapal isap produksi;

53. melaksanakan inspeksi kualitas air permukaan pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi;
54. melaksanakan inspeksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi;
55. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada fasilitas permukaan;
56. melaksanakan inspeksi pengamanan instalasi pada fasilitas permukaan;
57. melaksanakan inspeksi kompetensi tenaga teknis pada fasilitas permukaan;
58. melaksanakan inspeksi kelayakan dan pemeliharaan laboratorium;
59. melaksanakan inspeksi sistem pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana instalasi dan peralatan pertambangan;
60. melaksanakan inspeksi penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun pada fasilitas permukaan;
61. melaksanakan inspeksi penanganan ceceran pelumas/oli pada fasilitas permukaan;
62. melaksanakan inspeksi *sewage treatment* pada fasilitas permukaan;
63. melaksanakan inspeksi fasilitas penyimpanan tailing (*Tailing Storage Facility*);
64. melaksanakan inspeksi kelayakan konstruksi tempat penyimpanan tailing (*Tailing Storage Facility*);
65. melaksanakan inspeksi kelayakan penimbunan bahan baku/mineral atau batubara;
66. melaksanakan inspeksi kelayakan jenis, jumlah, dan kualitas umpan;
67. melaksanakan inspeksi kelayakan penimbunan hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
68. melaksanakan inspeksi kelayakan jenis, jumlah, dan kualitas hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
69. melaksanakan inspeksi kelayakan peralatan pengolahan dan/atau pemurnian;
70. melaksanakan inspeksi kelayakan sistem drainase pabrik pengolahan dan/atau pemurnian;
71. melaksanakan inspeksi kelayakan infrastruktur pendukung fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;

72. melaksanakan inspeksi penanganan sisa hasil pengolahan/pemurnian;
73. melaksanakan inspeksi pengelolaan timbunan hasil pengolahan;
74. melaksanakan inspeksi perolehan atau *recovery* pengolahan;
75. melaksanakan inspeksi penanganan bahan berbahaya dan beracun pada pengolahan dan pemurnian;
76. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
77. melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
78. melaksanakan inspeksi detoksifikasi pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
79. melaksanakan inspeksi penanganan tailing pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
80. melaksanakan inspeksi penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
81. melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kegiatan di pelabuhan;
82. melaksanakan inspeksi kelaikan dan pemeliharaan pesawat angkat di pelabuhan;
83. melaksanakan inspeksi kelaikan pemadam kebakaran di pelabuhan;
84. melaksanakan inspeksi peralatan keselamatan pelabuhan;
85. melaksanakan inspeksi kelengkapan fasilitas keadaan darurat di pelabuhan;
86. melaksanakan inspeksi penanganan limbah di pelabuhan;
87. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan eksplorasi dan pemasangan tanda batas;
88. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang bawah tanah;
89. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang permukaan;

90. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang semprot;
91. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pertambangan kapal keruk/kapal isap produksi;
92. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan fasilitas permukaan;
93. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pengolahan pemurnian;
94. melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pelabuhan;
95. melaksanakan inspeksi penggunaan standar;
96. melaksanakan inspeksi penggunaan standar kompetensi;
97. melaksanakan inspeksi program diklat;
98. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada kegiatan pascatambang;
99. melaksanakan inspeksi hasil reklamasi dan revegetasi pada kegiatan pascatambang;
100. melaksanakan inspeksi kestabilan lereng pada kegiatan pascatambang;
101. melaksanakan inspeksi pengamanan sisa bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan pascatambang;
102. melaksanakan inspeksi kualitas air pada kegiatan pascatambang;
103. melaksanakan inspeksi kualitas tanah pada kegiatan pascatambang;
104. melaksanakan inspeksi erosi dan sedimentasi pada kegiatan pascatambang;
105. melaksanakan inspeksi pelaksanaan program pengembangan sosial budaya dan ekonomi pada kegiatan pascatambang;
106. menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan diskusi untuk tindakan koreksi;

107. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang;
108. melakukan persiapan pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
109. membuat sketsa lokasi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
110. melakukan rekonstruksi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
111. memeriksa peralatan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
112. memeriksa sarana tanggap darurat atau sarana pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
113. mengidentifikasi sebaran dampak dari kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
114. mengumpulkan dan menelaah data untuk pengujian; dan
115. menyiapkan alat uji dan lembar pengujian.

C. INSPEKTUR TAMBANG AHLI MADYA

Uraian kegiatan tugas jabatan Inspektur Tambang Ahli Madya, meliputi:

1. memeriksa dan menyempurnakan konsep rencana inspeksi;
2. memeriksa dan menyempurnakan konsep program inspeksi;
3. mengevaluasi perencanaan konstruksi pertambangan;
4. mengevaluasi pelaksanaan konstruksi pertambangan termasuk komisioning;
5. melaksanakan pengujian kompetensi tenaga teknis pertambangan;
6. melaksanakan inspeksi sistem dokumentasi dan kontrol dokumen;
7. melaksanakan inspeksi kompetensi tenaga kerja;
8. melaksanakan inspeksi tempat pelatihan dan/atau tempat uji kompetensi;
9. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kompetensi tenaga teknis pertambangan;
10. melaksanakan inspeksi pembongkaran fasilitas tambang;
11. melaksanakan inspeksi pembongkaran fasilitas pengolahan/pemurnian;

12. melaksanakan inspeksi pembongkaran fasilitas pelabuhan/dermaga;
13. melaksanakan inspeksi kegiatan reklamasi pada pascatambang;
14. melaksanakan inspeksi daerah yang harus diamankan pada pascatambang;
15. melakukan inspeksi penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan;
16. melakukan inspeksi penerapan sistem manajemen lingkungan pertambangan;
17. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan pertambangan mineral dan batubara oleh inspektur tambang yang berada di bawah jenjang jabatannya;
18. melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
19. mengukur dan menelaah kualitas lingkungan atau melakukan pengujian peralatan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/ kasus lingkungan;
20. melakukan wawancara saksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
21. menganalisis penyebab kejadian pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
22. menyimpulkan hasil pemeriksaan dan menyiapkan bahan diskusi untuk tindakan koreksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
23. mempresentasikan dan mendiskusikan hasil pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
24. menyiapkan dan mendiskusikan bahan tindakan koreksi untuk pendaftaran dalam buku tambang;
25. melakukan persiapan inspeksi atau pemeriksaan kejadian bencana pertambangan;
26. membuat sketsa lokasi bencana pertambangan;
27. melakukan wawancara saksi pada pemeriksaan kejadian bencana pertambangan;
28. melakukan rekonstruksi kejadian bencana pertambangan;
29. memeriksa peralatan yang berhubungan dengan bencana pertambangan;

30. memeriksa sarana tanggap darurat atau pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan bencana pertambangan;
31. menelaah prosedur kerja standar yang berhubungan dengan bencana pertambangan;
32. mengidentifikasi sebaran dampak dari terjadinya bencana pertambangan;
33. menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi rutin;
34. menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan reklamasi kegiatan usaha pertambangan;
35. menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan hasil inspeksi pascatambang;
36. menganalisis dan melaporkan hasil pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
37. menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kelayakan operasi peralatan pertambangan;
38. menelaah dan mengevaluasi data dan studi/kajian teknis dalam rangka persetujuan atau pengecualian;
39. menelaah dan mengevaluasi dokumen permohonan persetujuan penggunaan teknologi baru dalam pelaksanaan operasi pertambangan;
40. mengevaluasi perencanaan teknik eksplorasi serta penghitungan sumber daya dan cadangan;
41. mengevaluasi perencanaan *recovery* penambangan;
42. mengevaluasi pendataan sumber daya serta cadangan mineral/batubara yang tidak tertambang;
43. mengevaluasi perencanaan program keselamatan, kesehatan dan/atau lingkungan kerja;
44. mengevaluasi perencanaan pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan;
45. mengevaluasi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
46. mengevaluasi perencanaan *recovery* pengolahan;
47. mengevaluasi pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
48. mengevaluasi dan menganalisis teori/metoda inspeksi yang ada;
dan
49. mengevaluasi dan menganalisis teori/metoda pengujian yang ada.

D. INSPEKTUR TAMBANG AHLI UTAMA

Uraian kegiatan tugas jabatan Inspektur Tambang Ahli Utama, meliputi:

1. merumuskan sistem pelaksanaan *komisioning* instalasi/peralatan pertambangan;
2. mengevaluasi, menganalisis dan melaporkan hasil komisioning tambang;
3. mengevaluasi menganalisis dan melaporkan hasil komisioning pengolahan dan/atau pemurnian;
4. menganalisis dan mengevaluasi sistem manajemen kontraktor (*contractor management system*) pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
5. menganalisis dan mengevaluasi materi uji kompetensi pengawas kegiatan usaha pertambangan;
6. mengevaluasi, menganalisis dan melaporkan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan;
7. mengevaluasi, menganalisis dan melaporkan penerapan sistem manajemen lingkungan pertambangan;
8. mengevaluasi perencanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan;
9. mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan;
10. mengevaluasi perencanaan sistem manajemen lingkungan pertambangan;
11. mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen lingkungan pertambangan;
12. memberikan keterangan ahli atau menjadi saksi ahli terkait kasus kecelakaan tambang, kejadian berbahaya, kasus lingkungan dan bencana pertambangan;
13. menyusun rencana strategis pencegahan dan mitigasi bencana pertambangan;
14. menganalisis kualitas lingkungan yang berhubungan dengan bencana pertambangan;
15. menganalisis dan menjustifikasi penyebab kejadian pada pemeriksaan bencana pertambangan;

16. menyimpulkan hasil pemeriksaan/investigasi dan merumuskan tindakan koreksi/rekomendasi hasil pemeriksaan bencana pertambangan;
17. memaparkan dan mendiskusikan rumusan rekomendasi/tindakan koreksi pada pemeriksaan bencana pertambangan;
18. menganalisis data, laporan dan informasi kejadian bencana pertambangan;
19. menganalisis dan melaporkan hasil pemeriksaan bencana pertambangan;
20. menganalisis dan menyimpulkan/memberikan rekomendasi persetujuan atau pengecualian terhadap studi/kajian teknis kegiatan pertambangan;
21. menganalisis dan menyimpulkan/rekomendasi penggunaan teknologi baru pertambangan;
22. mengevaluasi tingkat keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
23. mengevaluasi dan merekomendasikan perencanaan penambangan mineral atau batubara;
24. mengevaluasi perencanaan pengangkutan mineral atau batubara;
25. mengevaluasi perencanaan pengolahan dan/atau pemurnian;
26. mengevaluasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan mineral kadar rendah;
27. mengevaluasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan batubara kualitas rendah;
28. mengevaluasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan mineral ikutan;
29. mengevaluasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan cadangan marjinal;
30. mengevaluasi perencanaan pengamanan instalasi pertambangan;
31. menganalisis dan mengevaluasi program reklamasi kegiatan usaha pertambangan skala nasional;
32. menganalisis dan mengevaluasi program pascatambang kegiatan usaha pertambangan skala nasional;
33. memberikan bimbingan teknis kepada inspektur tambang yang berada di bawah jenjang jabatannya;
34. menemukan teori/metode baru untuk pengembangan teknik inspeksi pertambangan;

35. menemukan teori/metode baru untuk pengujian peralatan tambang;
36. menemukan teori/metode baru untuk pengembangan teknik pengujian lingkungan kerja pertambangan;
37. melakukan pembaharuan metode/sistem yang memiliki nilai perbaikan/penyempurnaan secara nyata terhadap metode/sistem inspeksi tambang yang telah ada; dan
38. menerapkan teori/metode/sistem baru hasil pengembangan/penyempurnaan/pembaharuan sendiri dalam bidang inspeksi tambang.

V. HASIL KERJA TUGAS JABATAN SESUAI JENJANG JABATAN

A. INSPEKTUR TAMBANG AHLI PERTAMA

Hasil kerja tugas jabatan Inspektur Tambang Ahli Pertama, meliputi:

1. data/informasi dalam bentuk *resume* objek inspeksi tambang;
2. *checklist* peralatan inspeksi;
3. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan contoh (*sample*) hasil kegiatan eksplorasi;
4. laporan/Berita Acara inspeksi kelistrikan dan penerangan pada kegiatan eksplorasi;
5. laporan/Berita Acara inspeksi pengamanan lubang hasil pemboran pada kegiatan eksplorasi;
6. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada kegiatan eksplorasi;
7. laporan/Berita Acara inspeksi lingkungan kerja pada kegiatan eksplorasi;
8. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan eksplorasi;
9. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan erosi dan sedimentasi pada kegiatan eksplorasi;
10. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan air tambang pada kegiatan eksplorasi;
11. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan limbah B3 pada kegiatan eksplorasi;
12. laporan/Berita Acara inspeksi reklamasi pada kegiatan eksplorasi;
13. laporan/Berita Acara inspeksi pelaksanaan kompilasi data wilayah dan persiapan teknis, serta evaluasi laporan pengukuran dan pemasangan Tanda Batas WIUP dan WIUPK;

14. laporan/Berita Acara inspeksi pemasangan Tanda Batas WIUP/WIUPK;
15. laporan/Berita Acara evaluasi laporan pemeliharaan dan perawatan Tanda Batas WIUP/WIUPK;
16. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian lokasi dan konstruksi fasilitas penambangan/ pengangkutan/ fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
17. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi tenaga pelaksana konstruksi;
18. laporan/Berita Acara inspeksi sistem drainase pada kegiatan konstruksi;
19. laporan/Berita Acara inspeksi sistem pengangkutan/penggunaan peralatan tambang bawah tanah;
20. laporan/Berita Acara inspeksi pengolahan di dalam tambang bawah tanah;
21. laporan/Berita Acara inspeksi penyimpanan sementara bijih atau batubara di dalam tambang bawah tanah;
22. laporan/Berita Acara inspeksi cadangan tidak tertambang pada tambang bawah tanah;
23. laporan/Berita Acara inspeksi pemuatan dan/atau "*draw point*" pada tambang bawah tanah;
24. laporan/Berita Acara inspeksi terowongan (*raise, drift, cross cut dll*);
25. laporan/Berita Acara inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang bawah tanah;
26. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada tambang bawah tanah;
27. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan tambang bawah tanah;
28. laporan/Berita Acara inspeksi ruang fasilitas bawah tanah;
29. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada tambang bawah tanah;
30. laporan/Berita Acara inspeksi penyimpanan bahan berbahaya dan beracun pada tambang bawah tanah;
31. laporan/Berita Acara inspeksi jalan tambang pada tambang permukaan;
32. laporan/Berita Acara inspeksi penggalian dan pemuatan mineral/batubara pada tambang permukaan;

33. laporan/Berita Acara inspeksi lereng tambang pada tambang permukaan;
34. laporan/Berita Acara inspeksi kemajuan tambang pada tambang permukaan;
35. laporan/Berita Acara inspeksi pemantauan kestabilan lereng tambang dan timbunan pada tambang permukaan;
36. laporan/Berita Acara inspeksi sistem penyaliran air tambang pada tambang permukaan;
37. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan tambang pada tambang permukaan;
38. laporan/Berita Acara inspeksi pendataan cadangan tidak tertambang pada tambang permukaan;
39. laporan/Berita Acara inspeksi penyimpanan sementara mineral/batubara pada tambang permukaan;
40. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan batubara swabakar pada tambang permukaan;
41. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang permukaan;
42. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang permukaan;
43. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan tanah/batuan penutup pada tambang permukaan;
44. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan air/drainase pada tambang permukaan;
45. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan lahan bekas tambang permukaan;
46. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan air asam tambang pada tambang permukaan;
47. laporan/Berita Acara inspeksi reklamasi dan revegetasi pada tambang permukaan;
48. laporan/Berita Acara inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang permukaan;
49. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan;
50. laporan/Berita Acara inspeksi sistem penanganan debu tambang pada tambang permukaan;

51. laporan/Berita Acara inspeksi lingkungan kerja pada tambang permukaan;
52. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja;
53. laporan/Berita Acara inspeksi sistem penyaliran air tambang pada tambang semprot;
54. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan tambang pada tambang semprot;
55. laporan/Berita Acara inspeksi kemajuan tambang semprot;
56. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau *recovery* konsentrator/ pencucian pada tambang semprot;
57. laporan/Berita Acara inspeksi cadangan tidak tertambang pada tambang semprot;
58. laporan/Berita Acara inspeksi penyimpanan sementara mineral pada tambang semprot;
59. laporan/Berita Acara inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang semprot;
60. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada tambang semprot;
61. laporan/Berita Acara inspeksi jalan tambang pada tambang semprot;
62. laporan/Berita Acara inspeksi pemeliharaan kolong kerja pada tambang semprot;
63. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang semprot;
64. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan tanah penutup pada tambang semprot;
65. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang semprot
66. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan air kerja pada tambang semprot;
67. laporan/Berita Acara inspeksi tinggi muka air tanah pada tambang semprot;
68. laporan/Berita Acara inspeksi reklamasi dan revegetasi pada tambang semprot;
69. laporan/Berita Acara inspeksi kemajuan penambangan menggunakan kapal keruk/kapal isap produksi;

70. melaksanakan inspeksi kelistrikan & penerangan pada kapal keruk/kapal isap produksi;
71. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada kapal keruk/kapal isap produksi;
72. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan Bahan Bakar Cair pada kapal keruk/kapal isap produksi;
73. laporan/Berita Acara inspeksi tangki ponton dan pompa pada kapal keruk/kapal isap produksi;
74. laporan/Berita Acara inspeksi alat navigasi pada kapal keruk/kapal isap produksi;
75. laporan/Berita Acara inspeksi komunikasi pada kapal keruk/kapal isap produksi;
76. laporan/Berita Acara inspeksi bangunan atas kapal keruk pada kapal keruk/kapal isap produksi;
77. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan pesawat angkat pada kapal keruk/kapal isap produksi;
78. laporan/Berita Acara inspeksi alat angkut orang (*boat*) pada kapal keruk/kapal isap produksi;
79. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan mesin kapal keruk/kapal isap produksi;
80. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan ceceran oli/bahan bakar minyak pada kapal keruk/kapal isap produksi;
81. laporan/Berita Acara inspeksi reklamasi pada kapal keruk/kapal isap produksi;
82. laporan/Berita Acara inspeksi sistem drainase pada fasilitas permukaan;
83. laporan/Berita Acara inspeksi konstruksi pada fasilitas permukaan;
84. laporan/Berita Acara inspeksi konstruksi tempat penyimpanan tailing (*Tailing Storage Facility*) pada fasilitas permukaan;
85. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan batubara swabakar pada *stockpile* pada fasilitas permukaan;
86. laporan/Berita Acara inspeksi poliklinik/Rumah Sakit pada fasilitas permukaan;
87. laporan/Berita Acara inspeksi penyediaan air bersih pada fasilitas permukaan;
88. laporan/Berita Acara inspeksi bengkel pada fasilitas permukaan;

89. laporan/Berita Acara inspeksi gudang bahan peledak pada fasilitas permukaan;
90. laporan/Berita Acara inspeksi gudang umum pada fasilitas permukaan;
91. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan air drainase pada fasilitas permukaan;
92. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan limbah non bahan berbahaya dan beracun pada fasilitas permukaan;
93. laporan/Berita Acara inspeksi penimbunan sampah pada fasilitas permukaan;
94. laporan/Berita Acara inspeksi kolam sedimen pada fasilitas permukaan;
95. laporan/Berita Acara inspeksi sistem penanganan debu pada fasilitas permukaan;
96. laporan/Berita Acara inspeksi sarana pembibitan;
97. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan tabung oksigen atau *acetyline*;
98. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan dan pemeliharaan tangki BBC;
99. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan dan pemeliharaan pesawat angkat;
100. laporan/Berita Acara inspeksi hunian/*camp*/kantor;
101. laporan/Berita Acara inspeksi fasilitas penimbunan/penyimpanan material penunjang kegiatan pertambangan dan barang bekas;
102. laporan/Berita Acara inspeksi sistem dan metode pengolahan dan/atau pemurnian;
103. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian penimbunan bahan baku/mineral atau batubara (*run of mine stockpile*);
104. laporan/Berita Acara inspeksi penimbunan hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
105. laporan/Berita Acara inspeksi sistem *drainase* pabrik pengolahan dan/atau pemurnian;
106. laporan/Berita Acara inspeksi pencampuran mineral atau batubara;
107. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan mineral kadar rendah atau batubara kualitas rendah;

108. laporan/Berita Acara inspeksi kelistrikan dan penerangan pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
109. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
110. laporan/Berita Acara inspeksi lingkungan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
111. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan pesawat angkat pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
112. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan air/*drainase* pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
113. laporan/Berita Acara inspeksi kelistrikan dan penerangan di pelabuhan;
114. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja di pelabuhan;
115. laporan/Berita Acara inspeksi konstruksi dermaga;
116. laporan/Berita Acara inspeksi fasilitas pemuatan di pelabuhan;
117. laporan/Berita Acara inspeksi bengkel di pelabuhan;
118. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan air di pelabuhan;
119. laporan/Berita Acara inspeksi kolam pengendap di pelabuhan;
120. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan eksplorasi;
121. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang bawah tanah;
122. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang permukaan;
123. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang semprot;
124. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi;
125. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan fasilitas permukaan;

126. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan pengolahan pemurnian;
127. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan pelabuhan;
128. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi pelaksanaan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan kompetensi Tenaga Kerja Asing (TKA) perusahaan jasa pertambangan;
129. laporan/Berita Acara inspeksi pelaksanaan program transfer keahlian dari Tenaga Kerja Asing ke Tenaga Kerja Indonesia Pemdamping di perusahaan jasa pertambangan;
130. laporan/Berita Acara inspeksi penggunaan subkontraktor lokal dan tenaga kerja lokal; dan
131. laporan/Berita Acara inspeksi administrasi penunjukan, pengesahan dan evaluasi posisi dan kompetensi Penanggung Jawab Operasional.

B. INSPEKTUR TAMBANG AHLI MUDA

Hasil kerja tugas jabatan Inspektur Tambang Ahli Muda, meliputi:

1. konsep dan bahan presentasi rencana inspeksi;
2. konsep program inspeksi;
3. bahan presentasi objek inspeksi;
4. Laporan/Berita Acara pertemuan pra-inspeksi;
5. laporan/Berita Acara inspeksi kegiatan pemetaan topografi/geologi/geoteknik;
6. laporan/Berita Acara inspeksi kegiatan penyelidikan geokimia/geofisika/pengeboran eksplorasi/pembuatan parit uji/pembuatan sumur uji;
7. laporan/Berita Acara inspeksi estimasi sumber daya dan cadangan;
8. laporan/Berita Acara inspeksi validitas data pelaporan hasil eksplorasi;
9. laporan/Berita Acara inspeksi tata cara pengukuran Titik Batas WIUP/WIUPK;

10. laporan/Berita Acara inspeksi Alat Pelindung Diri dan Alat Keselamatan pada kegiatan eksplorasi;
11. laporan/Berita Acara inspeksi kesiapan fasilitas keadaan darurat pada kegiatan eksplorasi;
12. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan limbah pada kegiatan eksplorasi;
13. laporan/Berita Acara inspeksi konstruksi fasilitas penambangan/pengangkutan/pengolahan dan/atau pemurnian;
14. laporan/Berita Acara evaluasi kemajuan operasi tambang bawah tanah;
15. laporan/Berita Acara inspeksi pillar dan penyanggaan tambang bawah tanah;
16. laporan/Berita Acara inspeksi sistem ventilasi udara tambang bawah tanah;
17. laporan/Berita Acara inspeksi kestabilan lubang bukaan tambang bawah tanah;
18. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan teknis sistem pengangkutan tambang bawah tanah;
19. laporan/Berita Acara inspeksi amblesan permukaan (*surface subsidence*);
20. laporan/Berita Acara inspeksi cadangan marginal pada tambang bawah tanah;
21. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau *recovery* penambangan pada tambang bawah tanah;
22. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau *recovery* pengangkutan pada tambang bawah tanah;
23. laporan/Berita Acara inspeksi keselamatan kerja pemboran dan peledakan pada tambang bawah tanah;
24. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang bawah tanah;
25. laporan/Berita Acara inspeksi fasilitas keadaan darurat pada tambang bawah tanah;
26. laporan/Berita Acara inspeksi kualitas udara dan sistem ventilasi pada tambang bawah tanah;
27. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang bawah tanah;

28. laporan/Berita Acara inspeksi penyimpanan limbah B3 pada tambang bawah tanah;
29. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan cadangan marginal pada tambang permukaan;
30. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau *recovery* penambangan pada tambang permukaan;
31. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau *recovery* pengangkutan pada tambang permukaan;
32. laporan/Berita Acara inspeksi peledakan pada tambang permukaan;
33. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang permukaan;
34. laporan/Berita Acara inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan;
35. laporan/Berita Acara inspeksi fasilitas keadaan darurat pada tambang permukaan;
36. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang permukaan;
37. laporan/Berita Acara inspeksi dewatering pada tambang permukaan;
38. laporan/Berita Acara inspeksi lokasi kerja tambang semprot;
39. laporan/Berita Acara inspeksi pengolahan bijih di tambang semprot;
40. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan cadangan marginal pada tambang semprot;
41. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau *recovery* penambangan pada tambang semprot;
42. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang semprot;
43. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada tambang semprot;
44. laporan/Berita Acara inspeksi bekas kolong pada tambang semprot;
45. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang semprot;
46. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan lokasi kerja kapal keruk/kapal isap produksi;

47. Laporan/Berita Acara inspeksi peralatan tambang pada kapal keruk/kapal isap produksi;
48. laporan/Berita Acara inspeksi pengolahan bijih di kapal keruk/kapal isap produksi;
49. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kapal keruk/kapal isap produksi;
50. laporan/Berita Acara inspeksi sistem penjangkaran pada kapal keruk/kapal isap produksi;
51. laporan/Berita Acara inspeksi kestabilan kapal keruk/kapal isap produksi;
52. laporan/Berita Acara inspeksi fasilitas keadaan darurat pada kapal keruk/kapal isap produksi;
53. laporan/Berita Acara inspeksi kualitas air permukaan pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi;
54. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi;
55. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada fasilitas permukaan;
56. laporan/Berita Acara inspeksi pengaman instalasi pada fasilitas permukaan;
57. laporan/Berita Acara inspeksi kompetensi tenaga teknis pada fasilitas permukaan;
58. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan dan pemeliharaan laboratorium;
59. laporan/Berita Acara inspeksi sistem pemeliharaan/perawatan sarana dan prasarana instalasi dan peralatan pertambangan;
60. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun pada fasilitas permukaan;
61. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan ceceran pelumas/oli pada fasilitas permukaan;
62. laporan/Berita Acara inspeksi *sewage treatment* pada fasilitas permukaan;
63. laporan/Berita Acara inspeksi fasilitas penyimpanan tailing (*Tailing Storage Facility*);
64. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan konstruksi tempat penyimpanan tailing (*Tailing Storage Facility*);

65. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan penimbunan bahan baku/mineral atau batubara;
66. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan jenis, jumlah, dan kualitas umpan;
67. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan penimbunan hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
68. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan jenis, jumlah, dan kualitas hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
69. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan peralatan pengolahan dan/atau pemurnian;
70. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan sistem *drainase* pabrik pengolahan dan/atau pemurnian;
71. laporan/Berita Acara inspeksi kelayakan infrastruktur pendukung fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian;
72. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan sisa hasil pengolahan/pemurnian;
73. laporan/Berita Acara inspeksi pengelolaan timbunan hasil pengolahan;
74. laporan/Berita Acara inspeksi perolehan atau *recovery* pengolahan;
75. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan bahan berbahaya dan beracun pada pengolahan dan pemurnian;
76. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
77. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
78. laporan/Berita Acara inspeksi detoksifikasi pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
79. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan tailing pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
80. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan limbah B3 pada kegiatan pengolahan dan pemurnian;
81. laporan/Berita Acara inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kegiatan di pelabuhan;
82. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan dan pemeliharaan pesawat angkat di pelabuhan;

83. laporan/Berita Acara inspeksi kelaikan pemadam kebakaran di pelabuhan;
84. laporan/Berita Acara inspeksi peralatan keselamatan pelabuhan;
85. laporan/Berita Acara inspeksi kelengkapan fasilitas keadaan darurat di pelabuhan;
86. laporan/Berita Acara inspeksi penanganan limbah di pelabuhan;
87. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan eksplorasi dan pemasangan tanda batas;
88. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang bawah tanah;
89. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang permukaan;
90. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang semprot;
91. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pertambangan kapal keruk/kapal isap produksi;
92. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan fasilitas permukaan;
93. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pengolahan pemurnian;
94. laporan/Berita Acara inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pelabuhan;
95. laporan/Berita Acara inspeksi penggunaan standar;
96. laporan/Berita Acara inspeksi penggunaan standar kompetensi;
97. laporan/Berita Acara inspeksi program diklat;
98. laporan/Berita Acara pertemuan pra-inspeksi pada kegiatan pascatambang;

99. laporan/Berita Acara inspeksi hasil reklamasi dan revegetasi pada kegiatan pascatambang;
100. laporan/Berita Acara inspeksi kestabilan lereng pada kegiatan pascatambang;
101. laporan/Berita Acara inspeksi pengamanan sisa bahan berbahaya dan beracun pada kegiatan pascatambang;
102. laporan/Berita Acara inspeksi kualitas air pada kegiatan pascatambang;
103. laporan/Berita Acara inspeksi kualitas tanah pada kegiatan pascatambang;
104. laporan/Berita Acara inspeksi erosi dan sedimentasi pada kegiatan pascatambang;
105. laporan/Berita Acara inspeksi pelaksanaan program pengembangan sosial budaya dan ekonomi pada kegiatan pascatambang;
106. kesimpulan hasil inspeksi dan bahan diskusi tindakan koreksi;
107. bahan presentasi dan pendaftaran dalam Buku Tambang tindakan koreksi;
108. data persiapan pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
109. sketsa lokasi kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
110. data/informasi hasil rekonstruksi (kronologis) kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
111. data peralatan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
112. data sarana tanggap darurat atau sarana pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya /kasus lingkungan;
113. data/peta sebaran dampak dari kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
114. data dan telaahan hasil pengujian; dan
115. data alat uji dan lembar pengujian.

C. INSPEKTUR TAMBANG AHLI MADYA

Hasil kerja tugas jabatan Inspektur Tambang Ahli Madya, meliputi:

1. rencana inspeksi;

2. program inspeksi;
3. hasil evaluasi perencanaan konstruksi pertambangan;
4. hasil evaluasi pelaksanaan konstruksi pertambangan termasuk komisioning;
5. laporan/Berita Acara pengujian kompetensi tenaga teknis pertambangan;
6. laporan/Berita Acara inspeksi sistem dokumentasi dan kontrol dokumen;
7. laporan/Berita Acara inspeksi kompetensi tenaga kerja;
8. laporan/Berita Acara inspeksi tempat pelatihan dan/atau tempat uji kompetensi.
9. laporan hasil pengujian kompetensi tenaga teknis pertambangan;
10. laporan/Berita Acara inspeksi pembongkaran fasilitas tambang;
11. laporan/Berita Acara inspeksi pembongkaran fasilitas pengolahan/pemurnian;
12. laporan/Berita Acara inspeksi pembongkaran fasilitas pelabuhan/dermaga;
13. laporan/Berita Acara inspeksi kegiatan reklamasi pada pascatambang;
14. laporan/Berita Acara inspeksi daerah yang harus diamankan pada pascatambang;
15. laporan/Berita Acara inspeksi penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan;
16. laporan/Berita Acara inspeksi penerapan sistem manajemen lingkungan pertambangan;
17. hasil evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan pertambangan mineral dan batubara oleh Inspektur Tambang yang berada di bawah jenjang jabatannya;
18. data/informasi (daftar hadir) pertemuan pra-inspeksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
19. data dan telaahan kualitas lingkungan atau melakukan pengujian peralatan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
20. hasil wawancara (keterangan) saksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;

21. analisis penyebab kejadian pada pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
22. kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindakan koreksi hasil pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
23. bahan presentasi hasil pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
24. bahan tindakan koreksi dan salinan pendaftaran dalam Buku Tambang;
25. data objek inspeksi atau pemeriksaan kejadian bencana pertambangan;
26. sketsa lokasi bencana pertambangan;
27. hasil wawancara saksi pada pemeriksaan kejadian bencana pertambangan;
28. hasil rekonstruksi (kronologis) kejadian bencana pertambangan;
29. data peralatan yang berhubungan dengan bencana pertambangan;
30. data sarana tanggap darurat atau pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan bencana pertambangan;
31. telaahan prosedur kerja standar yang berhubungan dengan bencana pertambangan;
32. peta sebaran dampak dari terjadinya bencana pertambangan;
33. laporan hasil inspeksi rutin;
34. laporan hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan reklamasi kegiatan usaha pertambangan;
35. laporan hasil analisis dan evaluasi hasil inspeksi pascatambang kegiatan usaha pertambangan;
36. laporan hasil pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya/kasus lingkungan;
37. laporan hasil pengujian kelayakan operasi peralatan pertambangan;
38. telaahan dan *checklist* data studi/kajian teknis dalam rangka persetujuan atau pengecualian;
39. telaahan dan hasil evaluasi dokumen permohonan persetujuan penggunaan teknologi baru dalam pelaksanaan operasi pertambangan;
40. hasil evaluasi perencanaan teknik eksplorasi serta penghitungan sumber daya dan cadangan;

41. hasil evaluasi perencanaan *recovery* penambangan;
42. hasil evaluasi pendataan sumber daya serta cadangan mineral/batubara yang tidak tertambang;
43. hasil evaluasi perencanaan program keselamatan, kesehatan dan/atau lingkungan kerja;
44. hasil evaluasi perencanaan pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan;
45. hasil evaluasi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
46. hasil evaluasi perencanaan *recovery* pengolahan;
47. hasil evaluasi pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan/atau pemurnian;
48. laporan hasil evaluasi dan analisis teori/metode inspeksi yang ada; dan
49. laporan hasil evaluasi dan analisis teori/metode pengujian yang ada.

D. INSPEKTUR TAMBANG AHLI UTAMA

Hasil kerja tugas jabatan Inspektur Tambang Ahli Utama, meliputi:

1. sistem pelaksanaan komisioning instalasi/peralatan pertambangan;
2. laporan/Berita Acara komisioning tambang;
3. laporan/Berita Acara komisioning pengolahan dan/atau pemurnian;
4. hasil evaluasi dan rekomendasi sistem manajemen kontraktor (*contractor management system*) pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan/Surat Keterangan Terdaftar;
5. hasil evaluasi dan rekomendasi materi uji kompetensi pengawas kegiatan usaha pertambangan;
6. hasil evaluasi dan analisis penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan;
7. hasil evaluasi dan analisis penerapan sistem manajemen lingkungan pertambangan;
8. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan;
9. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan;

10. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan sistem manajemen lingkungan pertambangan;
11. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi pelaksanaan sistem manajemen lingkungan pertambangan;
12. keterangan ahli atau menjadi saksi ahli terkait kasus kecelakaan tambang, kejadian berbahaya, kasus lingkungan dan bencana pertambangan;
13. rencana strategis pencegahan dan mitigasi bencana pertambangan;
14. hasil analisis kualitas lingkungan yang berhubungan dengan bencana pertambangan;
15. hasil analisis dan justifikasi penyebab kejadian pada pemeriksaan bencana pertambangan;
16. kesimpulan hasil pemeriksaan/investigasi dan konsep tindakan koreksi/rekomendasi hasil pemeriksaan bencana pertambangan;
17. bahan presentasi dan pendaftaran dalam Buku Tambang tindakan koreksi pada pemeriksaan bencana pertambangan;
18. dokumen rencana pemeriksaan kejadian bencana pertambangan;
19. laporan hasil pemeriksaan bencana pertambangan;
20. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi persetujuan atau pengecualian terhadap studi/kajian teknis kegiatan pertambangan;
21. hasil analisis dan kesimpulan/rekomendasi penggunaan teknologi baru pertambangan;
22. hasil evaluasi evaluasi tingkat keselamatan pertambangan mineral dan batubara;
23. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan penambangan mineral atau batubara;
24. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengangkutan mineral atau batubara;
25. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengolahan dan/atau pemurnian;
26. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan mineral kadar rendah;
27. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan batubara kualitas rendah;

28. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan mineral ikutan;
29. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan cadangan marjinal;
30. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi perencanaan pengamanan instalasi pertambangan;
31. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi program reklamasi kegiatan usaha pertambangan skala nasional;
32. hasil evaluasi dan usulan rekomendasi program pascatambang kegiatan usaha pertambangan skala nasional;
33. laporan bimbingan teknis kepada Inspektur Tambang yang berada di bawah jenjang jabatannya;
34. teori/metoda baru untuk pengembangan teknik inspeksi pertambangan;
35. teori/metoda baru untuk pengujian peralatan tambang;
36. teori/metoda baru untuk pengembangan teknik pengujian lingkungan kerja pertambangan;
37. hasil pembaharuan metode/sistem yang memiliki nilai perbaikan/penyempurnaan secara nyata terhadap metode/sistem inspeksi tambang yang telah ada; dan
38. laporan hasil penerapan teori/metode/sistem baru hasil pengembangan/penyempurnaan/pembaharuan sendiri dalam bidang inspeksi tambang.

VI. PENILAIAN ANGKA KREDIT BAGI INSPEKTUR TAMBANG YANG MELAKSANAKAN TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Inspektur Tambang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka IV, maka Inspektur Tambang lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
2. Dalam hal pada unit kerja terdapat salah satu jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yang volume beban tugasnya melebihi kebutuhan jabatan Inspektur Tambang, maka Inspektur Tambang yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang

jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

3. Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, ditetapkan sebagai berikut:

a. Inspektur Tambang yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017.

Contoh:

Sdr. Wisnu Cakra, S.T., M.T, NIP. 197902202002031001, jabatan Inspektur Tambang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Subdirektorat Standardisasi dan Usaha Jasa Mineral dan Batubara.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kompetensi tenaga teknis pertambangan dengan Angka Kredit 0,120. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Inspektur Tambang Ahli Madya.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,120 = 0,096$.

b. Inspektur Tambang yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018.

Contoh:

Sdr. Wisnu Cakra, S.T, M.T, NIP. 197812102002111004, jabatan Inspektur Tambang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Subdirektorat Pengawasan Teknik Mineral dan Batubara.

Yang bersangkutan ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan inspeksi alat navigasi pada kapal keruk/kapal isap produksi dengan Angka Kredit 0,04. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Inspektur Tambang Ahli Pertama.

Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,04 = 0,04$.

VII. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA, DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN, PENYESUAIAN (*INPASSING*), PROMOSI.

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

1. Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang ditetapkan oleh:
 - a. Presiden untuk jenjang jabatan Inspektur Tambang Ahli Utama; dan
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Inspektur Tambang Ahli Pertama sampai dengan jenjang jabatan Inspektur Tambang Ahli Madya.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam jabatan Inspektur Tambang, dikecualikan bagi jenjang jabatan Inspektur Tambang Ahli Madya.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang melalui pengangkatan pertama harus memenuhi syarat:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) bidang Teknik Pertambangan/Teknik Geologi/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Teknik Kimia/Teknik Fisika/Teknik Lingkungan/Teknik Elektro/Teknik Metalurgi/Teknik Geodesi/Teknik Geofisika/Teknik Industri/Teknik Perminyakan atau Diploma IV (D-IV) Keinspekturan Tambang, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dari Calon PNS.
3. Calon PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2 setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.
4. Pelaksanaan tugas di bidang inspeksi tambang sejak menjadi Calon PNS dan/atau PNS selama belum diangkat dalam jabatan Inspektur Tambang dapat dinilai sepanjang bukti fisik lengkap.
5. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 3, paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan.
6. Inspektur Tambang yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 5 diberhentikan dari jabatannya.
7. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV) bidang Teknik Pertambangan/Teknik Geologi/Teknik Sipil/Teknik Mesin/Teknik Kimia/Teknik Fisika/ Teknik Lingkungan/ Teknik Elektro/Teknik Metalurgi/Teknik Geodesi/Teknik Geofisika/Teknik Industri/Teknik Perminyakan atau Diploma IV (D-IV) Keinspekturan Tambang, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;

- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Madya; dan
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
2. Pengangkatan jabatan fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
 3. Pengalaman di bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f, dapat dihitung secara kumulatif.
 4. Usia sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h, merupakan batas usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Contoh:

Sdr. Ir. Taswin, S.T., NIP. 196306101994031001, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, menduduki jabatan Kepala Subdirektorat Pengawasan Eksplorasi Mineral pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang untuk menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2017 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2018, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1963.

5. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1, sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
6. Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
7. Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan unsur penunjang.

Contoh:

Sdr. Herlambang, S.T., M.T, NIP. 197804082007031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral Pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.

Selama menduduki jabatan Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral, yang bersangkutan melakukan kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

- 1) Diklat fungsional bidang pertambangan mineral dan batubara sebesar 5 Angka Kredit.
- 2) Pelaksanaan tugas di bidang inspeksi tambang sebesar 25 Angka Kredit.
- 3) Pengembangan profesi sebesar 5 Angka Kredit.

b. Unsur penunjang

Mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seminar di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagai moderator sehingga memperoleh 2 Angka Kredit.

Dalam hal demikian, Angka Kredit ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang yakni sebesar 37 Angka Kredit ditambah Angka Kredit dari pendidikan Magister (S2) sebesar 150 Angka Kredit, jumlah keseluruhan yakni sebesar 187 Angka Kredit. Maka Sdr. Herlambang, S.T., M.T, diangkat dalam Jabatan Fungsional

Inspektur Tambang Ahli Pertama dengan tidak didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

8. Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

D. PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN DAN PANGKAT

1. PNS yang pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017 ditetapkan, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang, dapat disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan keteknikan dan lingkungan pertambangan paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017.
3. Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya berlaku selama masa penyesuaian (*inpassing*).
4. Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
5. Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;

- b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
 - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
 - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
 - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
6. Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka pelaksanaan penyesuaian (*inpassing*) harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan.
 7. PNS yang dalam masa penyesuaian (*inpassing*) telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian (*inpassing*) telah mempergunakan pangkat terakhir.
 8. PNS yang telah disesuaikan (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 9. Keputusan penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 10. Penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, harus selesai ditetapkan paling lambat 31 Desember 2018

E. PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI

1. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang melalui promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
 - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang melalui promosi sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
3. Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. SASARAN KERJA PEGAWAI, TARGET ANGKA KREDIT, PENILAIAN PRESTASI KERJA, DAN HUKUMAN DISIPLIN

A. SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Pada awal tahun, setiap Inspektur Tambang wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
2. SKP Inspektur Tambang disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
3. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari butir kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. SKP dapat ditambahkan dengan kegiatan lain yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit kerja atau atasan langsung.
5. SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

B. TARGET ANGKA KREDIT

1. Inspektur Tambang wajib memenuhi target Angka Kredit setiap tahun pada jenjang jabatan yang didudukinya, paling sedikit:
 - a. 12,5 untuk Inspektur Tambang Ahli Pertama;
 - b. 25 untuk Inspektur Tambang Ahli Muda;
 - c. 37,5 untuk Inspektur Tambang Ahli Madya; dan
 - d. 50 untuk Inspektur Tambang Ahli Utama.
2. Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari sub unsur diklat, kegiatan inspeksi tambang, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, tidak berlaku bagi Inspektur Tambang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

4. Inspektur Tambang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari kegiatan inspekti tambang dan pengembangan profesi.
5. Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan angka 4 sebagai dasar untuk penilaian SKP.

C. PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian prestasi kerja Inspektur Tambang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerja Inspektur Tambang mulai 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan Januari 2019.

2. Penilaian Prestasi Kerja Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh atasan langsung.

D. HUKUMAN DISIPLIN DAN SANKSI

1. Inspektur Tambang mendapatkan hukuman disiplin apabila pencapaian sasaran kerja akhir tahun sebagai berikut:
 - a. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Inspektur Tambang yang hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. Pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun bagi Inspektur Tambang yang hanya mencapai kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Selain hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, Inspektur Tambang yang tidak dapat memperoleh target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1, dan angka 4 diberikan sanksi.
3. Pemberian sanksi bagi Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

IX. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Inspektur Tambang disampaikan oleh Inspektur Tambang kepada pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Inspektur Tambang yang bersangkutan.
2. Usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan melampirkan Daftar Usul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 4a sampai dengan Anak Lampiran 4d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Inspektur Tambang harus dilampirkan, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan inspeksi tambang, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Inspektur Tambang, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; atau
 - d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan fotokopi bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
4. Surat pernyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus dilampiri dengan bukti fisik.
5. Pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat Administrator atau Pengawas yang bertanggung jawab di bidang tata usaha menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka

Kredit kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

6. Usulan penetapan Angka Kredit Inspektur Tambang diajukan oleh:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara untuk Angka Kredit Inspektur Tambang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Inspektur Tambang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
 - b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara untuk mengusulkan Angka Kredit Inspektur Tambang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Tambang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara;
 - c. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara untuk Angka Kredit Inspektur Tambang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Inspektur Tambang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang ditempatkan di dinas provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara; dan
 - d. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Dinas yang membidangi pertambangan mineral dan batubara di Provinsi kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara untuk mengusulkan Angka Kredit Inspektur Tambang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Tambang Ahli

Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang ditempatkan di dinas provinsi yang membidangi pertambangan mineral dan batubara.

7. Pejabat yang berwenang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
8. Dalam hal melakukan proses penilaian dan penetapan DUPAK menjadi Penetapan Angka Kredit (PAK), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

B. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan Angka Kredit terhadap Inspektur Tambang dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat Inspektur Tambang dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
3. Setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit bagi Inspektur Tambang harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017.
4. Bahan usulan penetapan Angka Kredit yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada angka 3 kemudian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
5. Asli penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
 - b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;
 - d. Inspektur Tambang yang bersangkutan; dan
 - e. Pejabat lain yang dianggap perlu.
6. Penetapan Angka Kredit Inspektur Tambang, dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

X. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN TIM TEKNIS

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, yaitu:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara untuk Angka Kredit bagi Inspektur Tambang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Inspektur Tambang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara bagi Inspektur Tambang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Tambang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
2. Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan pada angka IX huruf B angka 2, maka Angka Kredit

dapat ditetapkan oleh pejabat lain, setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

5. Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit tidak dapat diajukan keberatan.

B. TIM PENILAI

1. Umum

- a. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dibantu oleh Tim Penilai yang terdiri atas:
 - 1) Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara untuk Angka Kredit Inspektur Tambang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Inspektur Tambang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
 - 2) Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara untuk Angka Kredit Inspektur Tambang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Tambang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- b. Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara untuk Tim Penilai Pusat;
 - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi mineral dan batubara untuk Tim Penilai Unit Kerja.
- c. Tim Penilai terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi keteknikan dan lingkungan pertambangan mineral dan batubara, unsur kepegawaian, dan Inspektur Tambang.
- d. Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - 1) seorang Ketua merangkap anggota;
 - 2) seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - 3) paling kurang 3 (tiga) orang anggota.

- e. Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada huruf d harus berjumlah ganjil.
 - f. Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Inspektur Tambang Ahli Madya.
 - g. Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2), harus berasal dari unsur kepegawaian.
 - h. Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3), paling sedikit 2 (dua) orang dari Inspektur Tambang.
 - i. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Inspektur Tambang yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Inspektur Tambang; dan
 - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
 - j. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
 - k. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
 - l. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
 - m. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota.
 - n. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Inspektur Tambang, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Inspektur Tambang.
2. Tugas Tim Penilai
- a. Tugas Tim Penilai Pusat yaitu:
 - 1) membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi mineral dan batubara dalam menetapkan Angka Kredit bagi Inspektur Tambang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan

- ruang IV/a sampai dengan Inspektur Tambang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e; dan
- 2) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
- b. Tugas Tim Unit Kerja yaitu:
- 1) membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada Direktorat Jenderal yang membidangi mineral dan batubara dalam menetapkan Angka Kredit bagi Inspektur Tambang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Inspektur Tambang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
 - 2) melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 1);

C. TIM TEKNIS

1. Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

XI. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan pangkat Inspektur Tambang, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;

- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menduduki jabatan Inspektur Tambang Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Inspektur Tambang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 3. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menduduki jabatan Inspektur Tambang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 4. Kenaikan pangkat PNS Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menduduki jabatan Inspektur Tambang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Inspektur Tambang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 5. Kenaikan pangkat bagi Inspektur Tambang dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Sdr. Purnomo, S.T., NIP. 197905052002041001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Inspektur Tambang Ahli Muda.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2019, Sdr. Purnomo, S.T., memperoleh Angka Kredit sebesar 405 dan akan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2019. Maka

sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Inspektur Tambang Ahli Madya.

6. Inspektur Tambang yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Contoh:

Sdr. Reza Bahari, S.T., NIP. 198010162005041010, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2017, jabatan Inspektur Tambang Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata, golongan ruang III/c, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 210.

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Reza Bahari, S.T., memiliki kelebihan 10 Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

7. Inspektur Tambang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang diduduki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan inspeksi tambang.

Contoh:

Sdr. Zaki Fajri, S.T., NIP. 198502102008031001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2016, jabatan Inspektur Tambang Ahli Muda, dengan Angka Kredit sebesar 225.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja bulan Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, Sdr. Zaki Fajri, S.T., telah mengumpulkan Angka Kredit sebesar 80 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang dimilikinya sejak 31 Maret 2017 telah memiliki Angka Kredit yang dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yaitu sebesar 305.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yangudukinya yakni sejak 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2018 untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, Sdr. Zaki Fajri, S.T., wajib mengumpulkan Angka Kredit paling kurang $20\% \times 100 = 20$.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Inspektur Tambang, dapat dipertimbangkan apabila tersedia kebutuhan jabatan Inspektur Tambang dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan atau uji kompetensi.
2. Kenaikan jabatan dari Inspektur Tambang Ahli Madya menjadi Inspektur Tambang Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Kenaikan jabatan dari Inspektur Tambang Ahli Pertama sampai dengan menjadi Inspektur Tambang Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Inspektur Tambang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Tambang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a wajib mengumpulkan sebanyak 6 (enam) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Saryanto, S.T., NIP. 198003082003041002, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2015, jabatan Inspektur Tambang Ahli Muda, Angka Kredit Kumulatif sebesar 315. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 90, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 3 Angka Kredit tugas Inspektur Tambang.

b. Pelaksanaan kegiatan Inspeksi tambang = 81 Angka Kredit

c. Pengembangan Profesi

Membuat karya tulis ilmiah hasil = 6 Angka Kredit penelitian di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Saryanto, S.T., adalah $315 + 90 = 405$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Saryanto, S.T., telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 6 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Inspektur Tambang jenjang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

5. Inspektur Tambang Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan dan/atau pangkat menjadi Inspektur Tambang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d wajib mengumpulkan sebanyak 12 (dua belas) Angka Kredit yang berasal dari sub unsur pengembangan profesi.

Contoh:

Sdr. Ir. Albert Simanjuntak, NIP. 196603081990041002, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2014, jabatan Inspektur Tambang Ahli Madya, Angka Kredit Kumulatif sebesar 720. Pada waktu penilaian bulan Januari 2018, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 134, dengan rincian sebagai berikut:

a. Diklat fungsional/teknis yang mendukung = 10 Angka Kredit tugas Inspektur Tambang.

b. Pelaksanaan kegiatan inspeksi tambang = 112 Angka Kredit

c. Pengembangan Profesi

Membuat karya tulis ilmiah hasil = 12 Angka Kredit penelitian di bidang pertambangan

mineral dan batubara yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diakui oleh kementerian yang bersangkutan

Jumlah keseluruhan Angka Kredit yang diperoleh Sdr. Ir. Albert Simanjuntak, adalah $720 + 134 = 854$ Angka Kredit.

Dalam hal demikian, mengingat Sdr. Ir. Albert Simanjuntak, telah memenuhi Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi sebesar 12 Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. Maka setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan dapat diangkat dalam jabatan Inspektur Tambang jenjang Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.

6. Angka Kredit dari sub unsur pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan Pangkat dan/atau jabatan masing-masing sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan dan/atau pangkat sebelumnya.
7. Uji kompetensi bagi Inspektur Tambang yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.
8. Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

C. ANGKA KREDIT KUMULATIF

1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan bagi Inspektur Tambang terdiri atas:
 - a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
 - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, komposisinya diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

XII. PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

A. PEMBERHENTIAN

1. Inspektur Tambang diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, atau jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

B. PENGANGKATAN KEMBALI

1. Inspektur Tambang yang diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.
2. Inspektur Tambang yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
3. Inspektur Tambang yang diberhentikan karena menjalani cuti diluar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
4. Inspektur Tambang yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
5. Inspektur Tambang yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator,

jabatan Pengawas atau jabatan Pelaksana, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.

6. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Inspektur Tambang.
7. Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama menjalani pemberhentian dari jabatan.
8. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dibuat menurut contoh formulir tercantum dalam Anak Lampiran 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

XIII. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian Peraturan Badan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN 1
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Calon Inspektur Tambang dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang jenjang dengan angka kredit sebesar (**)
- KEDUA :
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PER-
PINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR TAMBANG

KEPUTUSAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara
NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah
memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Inspektur Tambang melalui perpindahan dari jabatan lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur
Tambang jenjang dengan angka kredit sebesar (**)
- KEDUA :
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 3
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
 KEPUTUSAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

KEPUTUSAN
 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR
 TENTANG
 PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 INSPEKTUR TAMBANG
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang melalui penyesuaian/ *inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : mengangkat:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Unit Kerja :
 Terhitung mulai tanggal disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 pada tanggal

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara*);
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

ANAK LAMPIRAN 4a
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG AHLI PERTAMA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

| NO | KETERANGAN PERORANGAN | UNSUR YANG DINILAI | | | | | |
|----|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | PENDIDIKAN | | | | | | |
| | A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar | | | | | | |
| | Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar | | | | | | |
| | 1 Doktor (S3) | | | | | | |
| | 2 Magister (S2) | | | | | | |
| | 3 Sarjana (S1) | | | | | | |
| | B. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat | | | | | | |
| | Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang di bidang pertambangan mineral dan batubara dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat | | | | | | |
| | 1 Lamanya 960 jam atau lebih | | | | | | |
| | 2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam | | | | | | |
| | 3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam | | | | | | |
| | 4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam | | | | | | |
| | 5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam | | | | | | |
| | 6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam | | | | | | |
| | 7 Lamanya kurang dari 30 jam | | | | | | |
| II | INSPEKSI TAMBANG | | | | | | |
| | A Pelaksanaan inspeksi | | | | | | |
| | 1 Persiapan Inspeksi Rutin | | | | | | |
| | a Menelaah data objek inspeksi dalam rangka persiapan inspeksi rutin | | | | | | |
| | b Menyiapkan peralatan inspeksi dalam rangka persiapan inspeksi rutin | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 2 | Melaksanakan Inspeksi Rutin | | | | | | |
| | a | Eksplorasi | | | | | | |
| | | 1) Melaksanakan inspeksi penanganan contoh (<i>sample</i>) hasil kegiatan eksplorasi | | | | | | |
| | | 2) Melaksanakan inspeksi kelistrikan & penerangan pada kegiatan eksplorasi | | | | | | |
| | | 3) Melaksanakan inspeksi pengamanan lubang hasil pemboran | | | | | | |
| | | 4) Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada kegiatan eksplorasi | | | | | | |
| | | 5) Melaksanakan inspeksi lingkungan kerja pada kegiatan eksplorasi | | | | | | |
| | | 6) Melaksanakan inspeksi peralatan eksplorasi | | | | | | |
| | | 7) Melaksanakan inspeksi penanganan erosi dan sedimentasi pada kegiatan eksplorasi | | | | | | |
| | | 8) Melaksanakan inspeksi pengejaan air tambang pada kegiatan eksplorasi | | | | | | |
| | | 9) Melaksanakan inspeksi penanganan limbah B3 pada kegiatan eksplorasi | | | | | | |
| | | 10) Melaksanakan inspeksi reklamasi pada kegiatan eksplorasi | | | | | | |
| | b | Tanda Batas WIUP/WIUPK | | | | | | |
| | | 1) Melaksanakan inspeksi pelaksanaan kompilasi data wilayah dan persiapan teknis, serta evaluasi laporan pengukuran dan pemasangan Tanda Batas WIUP dan WIUPK | | | | | | |
| | | 2) Melaksanakan inspeksi pemasangan Tanda Batas WIUP/WIUPK | | | | | | |
| | | 3) Melaksanakan inspeksi terhadap pemeliharaan dan perawatan Tanda Batas WIUP/WIUPK | | | | | | |
| | c | Konstruksi | | | | | | |
| | | 1) Melaksanakan inspeksi kesesuaian lokasi dan konstruksi fasilitas penambangan/ pengangkutan/ fasilitas pengolahan dan/ atau pemurnian | | | | | | |
| | | 2) Melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi tenaga pelaksana konstruksi | | | | | | |
| | | 3) Melaksanakan inspeksi sistem drainase pada kegiatan konstruksi | | | | | | |
| | d | Tambang Bawah Tanah | | | | | | |
| | | 1) Melaksanakan inspeksi sistem pengangkutan/ penggunaan peralatan tambang bawah tanah | | | | | | |
| | | 2) Melaksanakan inspeksi pengolahan di dalam tambang bawah tanah | | | | | | |
| | | 3) Melaksanakan inspeksi penyimpanan sementara bijih atau batubara di dalam tambang bawah tanah | | | | | | |
| | | 4) Melaksanakan inspeksi cadangan tidak tertambang pada tambang bawah tanah | | | | | | |
| | | 5) Melaksanakan inspeksi pemuatan dan/ atau " <i>draw point</i> " pada tambang bawah tanah | | | | | | |
| | | 6) Melaksanakan inspeksi terowongan (<i>raise, drift, cross cut</i> dll) | | | | | | |
| | | 7) Melaksanakan inspeksi kelistrikan & penerangan pada tambang bawah tanah | | | | | | |
| | | 8) Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja para tambang bawah tanah | | | | | | |
| | | 9) Melaksanakan inspeksi peralatan tambang bawah tanah | | | | | | |
| | | 10) Melaksanakan inspeksi ruang fasilitasi bawah tanah | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|------|--------|-------------|------|--------|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| 1 | 2 | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 11) | Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada tambang bawah tanah | | | | | |
| | 12) | Melaksanakan inspeksi penyimpanan B3 pada tambang bawah tanah | | | | | |
| | e | Tambang Permukaan | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi jalan tambang pada tambang permukaan | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi penggalian dan pemuatan mineral/ batubara pada tambang permukaan | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi lereng tambang pada tambang permukaan | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi kemajuan operasi tambang pada tambang permukaan | | | | | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi pemantauan kestabilan lereng tambang dan timbunan pada tambang permukaan | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi sistem penyaliran air tambang pada tambang permukaan | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi peralatan tambang pada tambang permukaan | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi pendataan cadangan tidak tertambang pada tambang permukaan | | | | | |
| | 9) | Melaksanakan inspeksi penyimpanan sementara mineral/ batubara pada tambang permukaan | | | | | |
| | 10) | Melaksanakan inspeksi penanganan batubara swabakar pada tambang permukaan | | | | | |
| | 11) | Melaksanakan inspeksi penanganan pembersihan lahan pada tambang permukaan | | | | | |
| | 12) | Melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang permukaan | | | | | |
| | 13) | Melaksanakan inspeksi penanganan tanah/batuan penutup pada tambang | | | | | |
| | 14) | Melaksanakan inspeksi pengelolaan air drainase pada tambang permukaan | | | | | |
| | 15) | Melaksanakan inspeksi penanganan lahan bekas tambang permukaan | | | | | |
| | 16) | Melaksanakan inspeksi penanganan air asam tambang pada tambang permukaan | | | | | |
| | 17) | Melaksanakan inspeksi reklamasi dan revegetasi pada tambang permukaan | | | | | |
| | 18) | Melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang permukaan | | | | | |
| | 19) | Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan | | | | | |
| | 20) | Melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu tambang pada tambang permukaan | | | | | |
| | 21) | Melaksanakan inspeksi lingkungan kerja pada tambang permukaan | | | | | |
| | 22) | Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja | | | | | |
| | f | Tambang Semprot | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi sistem penyaliran air tambang pada tambang semprot | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi peralatan tambang pada tambang semprot | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi kemajuan tambang semprot | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi perolehan atau <i>recovery konsentrator</i> / pencucian pada tambang semprot | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi cadangan tidak tertambang pada tambang semprot | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi penyimpanan sementara mineral pada tambang semprot | | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi kelistrikan dan penerangan pada tambang semprot | | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang semprot | | | | | | |
| | 9) | Melaksanakan inspeksi jalan tambang pada tambang semprot | | | | | | |
| | 10) | Melaksanakan inspeksi kolong kerja pada tambang semprot | | | | | | |
| | 11) | Melaksanakan inspeksi penanganan tanah penutup pada tambang semprot | | | | | | |
| | 12) | Melaksanakan inspeksi penanganan tanah pucuk pada tambang semprot | | | | | | |
| | 13) | Melaksanakan inspeksi penanganan air kerja pada tambang semprot | | | | | | |
| | 14) | Melaksanakan inspeksi penanganan air kerja pada tambang semprot | | | | | | |
| | 15) | Melaksanakan inspeksi reklamasi dan revegetasi pada tambang semprot | | | | | | |
| | g | Kapal Isap dan/ atau Kapal Keruk | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi kemajuan penambangan menggunakan kapal keruk/kapal isap produksi | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi kelistrikan & penerangan pada kapal keruk/kapal isap produksi | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada kapal keruk/kapal isap produksi | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi penanganan Bahan Bakar Cair pada kapal keruk/kapal isap produksi | | | | | | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi tangki ponton & pompa pada kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi alat navigasi pada kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi komunikasi pada kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi bangunan atas kapal keruk pada kapal keruk/kapal isap produksi | | | | | | |
| | 9) | Melaksanakan inspeksi kelaikan pesawat angkat pada kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |
| | 10) | Melaksanakan inspeksi alat angkut orang (boat) pada kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |
| | 11) | Melaksanakan inspeksi kelaikan mesin kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |
| | 12) | Melaksanakan inspeksi penanganan cairan oli/bbm pada kapal keruk/kapal isap produksi | | | | | | |
| | 13) | Melaksanakan inspeksi reklamasi pada kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |
| | h | Fasilitas Permukaan | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi sistem drainase pada fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi konstruksi fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi konstruksi tempat penyimpanan tailing (<i>Tailing Storage Facility</i>) pada fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi penanganan batubara swabakar pada stockpile pada fasilitas permukaan | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi poliklinik/ RS pada fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi penyediaan air bersih pada fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi bengkel pada fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi gudang bahan peledak pada fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 9) | Melaksanakan inspeksi gudang umum pada fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 10) | Melaksanakan inspeksi penanganan air drainase pada fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 11) | Melaksanakan inspeksi penanganan limbah non B3 pada fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 12) | Melaksanakan inspeksi penimbunan sampah pada fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 13) | Melaksanakan inspeksi kolam sedimen pada fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 14) | Melaksanakan inspeksi sistem penanganan debu pada fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 15) | Melaksanakan inspeksi sarana pembibitan | | | | | | |
| | 16) | Melaksanakan inspeksi penanganan tabung oksigen atau <i>acetyline</i> | | | | | | |
| | 17) | Melaksanakan inspeksi fasilitas penimbunan BEC | | | | | | |
| | 18) | Melaksanakan inspeksi pesawat angkat | | | | | | |
| | 19) | Melaksanakan inspeksi hunian/ camp/kantor | | | | | | |
| | 20) | Melaksanakan inspeksi fasilitas penimbunan/ penyimpanan material penunjang kegiatan pertambangan dan barang bekas | | | | | | |
| | i | Pengolahan dan Pemurnian | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi sistem dan metode pengolahan dan/ atau pemurnian | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi penimbunan bahan baku /mineral atau batubara (<i>ROM stockpile</i>) | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi penimbunan hasil pengolahan dan/ atau pemurnian | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi sistem drainase pabrik pengolahan dan/ atau pemurnian | | | | | | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi pencampuran mineral atau batubara | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi pengelolaan mineral kadar rendah atau batubara kualitas rendah | | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi kelistrikan & penerangan pada kegiatan pengolahan dan pemurnian | | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian | | | | | | |
| | 9) | Melaksanakan inspeksi lingkungan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian | | | | | | |
| | 10) | Melaksanakan inspeksi kelaikan pesawat angkat pada kegiatan pengolahan dan pemurnian | | | | | | |
| | 11) | Melaksanakan inspeksi pengelolaan air drainase pada kegiatan pengolahan dan pemurnian | | | | | | |
| | j | Inspeksi Pelabuhan | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi kelistrikan & penerangan di pelabuhan | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja di pelabuhan | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi konstruksi dermaga | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi fasilitas pemuatan di pelabuhan | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi bengkel di pelabuhan | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi pengelolaan air di pelabuhan | | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi kolam pengendap di pelabuhan | | | | | | |
| | k | Inspeksi Standarisasi dan Usaha Jasa | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi / kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan eksplorasi | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/ kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang bawah tanah | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/ kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang permukaan | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan tambang semprot | | | | | | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/ kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/ kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi / kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan pengolahan pemurnian | | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi administrasi dan kesesuaian operasi/ kegiatan di lapangan dengan klasifikasi dan kualifikasi jasa pertambangannya pada kegiatan pelabuhan | | | | | | |
| | 9) | Melaksanakan inspeksi administrasi pelaksanaan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan kompetensi Tenaga Kerja Asing (TKA) perusahaan jasa pertambangan | | | | | | |
| | 10) | Melaksanakan inspeksi pelaksanaan program transfer keahlian dari Tenaga Kerja Asing ke Tenaga Kerja Indonesia pendamping di perusahaan jasa pertambangan | | | | | | |
| | 11) | Melaksanakan inspeksi penggunaan subkontraktor lokal dan tenaga kerja lokal | | | | | | |
| | 12) | Melaksanakan inspeksi administrasi penunjukan, pengesahan dan evaluasi posisi dan kompetensi Penanggung Jawab Operasional | | | | | | |
| III | PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | | | |
| | A | Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 1 | Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/ atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang dipublikasikan | | | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | 2 | Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/ atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di Perpustakaan | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | 3 | Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang dipublikasikan : | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang | | | | | | |
| | 4 | Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan : | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | 5 | Karya tulis ilmiah populer bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang disebarluaskan melalui media massa | | | | | | |
| | 6 | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | | | | | | |
| | B | Penyusunan buku pedoman atau ketentuan pelaksanaan atau pedoman teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 1 | Menyusun buku pedoman pelaksanaan di bidang Inspeksi Tambang | | | | | | |
| | 2 | Menyusun petunjuk teknis di bidang Inspeksi Tambang | | | | | | |
| | C | Penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 1 | Terjemahan/saduran di bidang ilmu tambang yang dipublikasikan | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | b | Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang | | | | | | |
| | 2 | Terjemahan/saduran di bidang ilmu tambang yang tidak dipublikasikan | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | c | Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan setiap abstrak | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III | | | | | | | | |
| IV PENUNJANG INSPEKSI TAMBANG | | | | | | | | |
| | A | Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 1 | Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 2 | Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan materi pelajaran yang terkait dengan pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|---|---|-------------|---|---|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B | Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah, sebagai : | | | | | | |
| | 1 Pemrasaran | | | | | | |
| | 2 Moderator | | | | | | |
| | 3 Pembahas | | | | | | |
| | 4 Narasumber | | | | | | |
| | 5 Peserta | | | | | | |
| C | Keanggotaan dalam organisasi profesi | | | | | | |
| | Menjadi anggota dalam organisasi profesi instruktur tambang | | | | | | |
| | 1 Pengurus | | | | | | |
| | 2 Anggota | | | | | | |
| D | Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/international | | | | | | |
| | Menjadi anggota dalam organisasi profesi provinsi/nasional/internasional | | | | | | |
| | 1 Tingkat nasional / internasional | | | | | | |
| | a Pengurus | | | | | | |
| | b Anggota | | | | | | |
| | 2 Tingkat provinsi | | | | | | |
| | a Pengurus | | | | | | |
| | b Anggota | | | | | | |
| E | Keanggotaan dalam Tim Penilai | | | | | | |
| | Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional inspektur tambang | | | | | | |
| F | Perolehan Penghargaan/ TandaJasa | | | | | | |
| | 1 Tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya | | | | | | |
| | a Tiga puluh (30) tahun | | | | | | |
| | b Dua puluh (20) tahun | | | | | | |
| | c Sepuluh (10) tahun | | | | | | |
| | 2 Gelar kehormatan akademis | | | | | | |
| G | Perolehan ijazah / gelar kesarjanaan lainnya | | | | | | |
| | 1 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas pokok | | | | | | |
| | a Sarjana (S I)/Diploma DIV | | | | | | |
| | b Pasca Sarjana (S2) | | | | | | |
| | c Doktor (S3) | | | | | | |
| | 2 Memperoleh gelar kehormatan akademis | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| V LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya | <p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> |
| VI Catatan Pejabat Pengusul : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya | <p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p> |
| VII Catatan Anggota Tim Penilai : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya | <p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> |
| VIII Catatan Ketua Tim Penilai : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya | <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p> |

ANAK LAMPIRAN 4b
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG AHLI MUDA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

| KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| 1. | Nama | : | | | | | |
| 2. | N I P | : | | | | | |
| 3. | Nomor Seri Kartu Pegawai | : | | | | | |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir | : | | | | | |
| 5. | Jenis Kelamin | : | | | | | |
| 6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | : | | | | | |
| 7. | Jabatan Inspektur Tambang / TMT | : | | | | | |
| 8. | Masa Kerja golongan lama | : | | | | | |
| 9. | Masa Kerja golongan baru | : | | | | | |
| 10. | Unit Kerja | : | | | | | |
| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | PENDIDIKAN | | | | | | |
| | A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar | | | | | | |
| | Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/ gelar | | | | | | |
| | 1 Doktor (S3) | | | | | | |
| | 2 Magister (S2) | | | | | | |
| | 3 Sarjana (S1) | | | | | | |
| | B. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat | | | | | | |
| | Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang di bidang pertambangan mineral dan batubara dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat | | | | | | |
| | 1 Lamanya 960 jam atau lebih | | | | | | |
| | 2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam | | | | | | |
| | 3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam | | | | | | |
| | 4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam | | | | | | |
| | 5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam | | | | | | |
| | 6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam | | | | | | |
| | 7 Lamanya kurang dari 30 jam | | | | | | |
| II | INSPEKSI TAMBANG | | | | | | |
| | A Perencanaan inspeksi tambang | | | | | | |
| | Menyusun konsep dan mempresentasikan rencana inspeksi | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | |
|-----|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B | Penyusunan program Inspeksi tambang | | | | | | |
| | Menyusun konsep program inspeksi | | | | | | |
| C | Pelaksanaan inspeksi | | | | | | |
| 1 | Persiapan Inspeksi Rutin | | | | | | |
| a | Melakukan presentasi objek inspeksi | | | | | | |
| b | Melakukan pertemuan pra-inspeksi | | | | | | |
| 2 | Melaksanakan Inspeksi Rutin | | | | | | |
| a | Eksplorasi | | | | | | |
| 1) | Melaksanakan inspeksi kegiatan pemetaan topografi / geologi / geoteknik | | | | | | |
| 2) | Melaksanakan inspeksi kegiatan penyelidikan geokimia/ geofisika/ pengeboran eksplorasi/ pembuatan parit uji/ pembuatan sumur uji | | | | | | |
| 3) | Melaksanakan inspeksi estimasi sumber daya dan cadangan | | | | | | |
| 4) | Melaksanakan inspeksi validitas data pelaporan hasil eksplorasi | | | | | | |
| b | Tanda Batas WIUP/WIUPK | | | | | | |
| | Melaksanakan inspeksi tata cara pengukuran Titik Batas WIUP/ WIUPK | | | | | | |
| c | Konstruksi | | | | | | |
| 1) | Melaksanakan inspeksi Alat Pelindung Diri dan Alat Keselamatan pada kegiatan eksplorasi | | | | | | |
| 2) | Melaksanakan inspeksi kesiapan fasilitas keadaan darurat pada kegiatan eksplorasi | | | | | | |
| 3) | Melaksanakan inspeksi penanganan limbah pada kegiatan eksplorasi | | | | | | |
| 4) | Melaksanakan inspeksi konstruksi fasilitas penambangan / pengangkutan / pengolahan dan/ atau pemurnian | | | | | | |
| d | Tambang Bawah Tanah | | | | | | |
| 1) | Melaksanakan evaluasi kemajuan operasi tambang bawah tanah | | | | | | |
| 2) | Melaksanakan inspeksi pillar dan penyanggaan tambang bawah tanah | | | | | | |
| 3) | Melaksanakan inspeksi sistem ventilasi udara tambang bawah tanah | | | | | | |
| 4) | Melaksanakan inspeksi kestabilan lubang bukaan tambang bawah tanah | | | | | | |
| 5) | Melaksanakan inspeksi kelayakan teknis sistem pengangkutan tambang bawah tanah | | | | | | |
| 6) | Melaksanakan inspeksi amblesan permukaan (<i>surface subsidence</i>) | | | | | | |
| 7) | Melaksanakan inspeksi cadangan marginal pada tambang bawah tanah | | | | | | |
| 8) | Melaksanakan inspeksi perolehan atau <i>recovery</i> penambangan pada tambang bawah tanah | | | | | | |
| 9) | Melaksanakan inspeksi perolehan atau <i>recovery</i> pengangkutan pada tambang bawah tanah | | | | | | |
| 10) | Melaksanakan inspeksi keselamatan kerja pemboran dan peledakan pada tambang bawah tanah | | | | | | |
| 11) | Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang bawah tanah | | | | | | |
| 12) | Melaksanakan inspeksi fasilitas keadaan darurat at pada tambang bawah tanah | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 13) | Melaksanakan inspeksi kualitas udara pada tambang bawah tanah | | | | | | |
| | 14) | Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang bawah tanah | | | | | | |
| | 15) | Melaksanakan inspeksi penyimpanan limbah B3 pada tambang bawah tanah | | | | | | |
| | e | Tambang Permukaan | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi penanganan cadangan marginal pada tambang permukaan | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi perolehan atau <i>recovery</i> penambangan pada tambang permukaan | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi perolehan atau <i>recovery</i> pengangkutan pada tambang permukaan | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi peledakan pada tambang permukaan | | | | | | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang permukaan | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi kesehatan kerja pada tambang permukaan | | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi fasilitas keadaan darurat pada tambang permukaan | | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang permukaan | | | | | | |
| | 9) | Melaksanakan inspeksi dewatering pada tambang permukaan | | | | | | |
| | f | Tambang Semprot | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi lokasi kerja tambang semprot | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi pengolahan bijih di tambang semprot | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi penanganan cadangan marginal pada tambang semprot | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi perolehan atau <i>recovery</i> penambangan pada tambang semprot | | | | | | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada tambang semprot | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada tambang semprot | | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi bekas kolong pada tambang semprot | | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan pada tambang semprot | | | | | | |
| | g | Kapal Isap dan/ atau Kapal Keruk | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi lokasi kerja kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi peralatan tambang pada kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi pengolahan bijih di kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi sistem penjangkaran pada kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi kestabilan kapal keruk/ kapal isap produksi | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|------|--------|-------------|------|--------|---|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi fasilitas keadaan darurat pada kapal keruk/kapal isap produksi | | | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi kualitas air permukaan pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi | | | | | | | |
| | 9) | Melaksanakan inspeksi pengelolaan limbah B3 pada kegiatan kapal keruk/kapal isap produksi | | | | | | | |
| | h | Fasilitas Permukaan | | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada fasilitas permukaan | | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi pengamanan instalasi pada fasilitas permukaan | | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi kompetensi tenaga teknis pada fasilitas permukaan | | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi kelaikan dan pemeliharaan laboratorium | | | | | | | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi sistem pemeliharaan / perawatan sarana dan prasarana instalasi dan peralatan pertambangan | | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi penanganan limbah B3 pada fasilitas permukaan | | | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi penanganan ceceran pelumas/ oli pada fasilitas permukaan | | | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi <i>sewage treatment</i> pada fasilitas permukaan | | | | | | | |
| | 9) | Melaksanakan inspeksi fasilitas penyimpanan tailing (<i>Tailing Storage Facility</i>) | | | | | | | |
| | 10) | Melaksanakan inspeksi kelayakan konstruksi tempat penyimpanan tailing (<i>Tailing Storage Facility</i>) | | | | | | | |
| | 11) | Melaksanakan inspeksi kelayakan penimbunan bahan baku/mineral atau batubara | | | | | | | |
| | i | Pengolahan dan Pemurnian | | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi kelayakan jenis, jumlah, dan kualitas umpan | | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi kelayakan penimbunan hasil pengolahan dan/ atau pemurnian | | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi kelayakan jenis, jumlah, dan kualitas hasil pengolahan dan/atau pemurnian | | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi kelayakan peralatan pengolahan dan/ atau pemurnian | | | | | | | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi kelayakan sistem drainase pabrik pengolahan dan/ atau pemurnian | | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi kelayakan infrastruktur pendukung fasilitas pengolahan dan/ atau pemurnian | | | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi penanganan sisa hasil pengolahan/ pemurnian | | | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi pengelolaan timbunan hasil pengolahan | | | | | | | |
| | 9) | Melaksanakan inspeksi perolehan atau <i>recovery</i> pengolahan | | | | | | | |
| | 10) | Melaksanakan inspeksi penanganan B3 pada pengolahan dan pemurnian | | | | | | | |
| | 11) | Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kegiatan pengolahan dan pemurnian | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 12) | Melaksanakan inspeksi peralatan pemantauan lingkungan kerja pada kegiatan pengolahan dan pemurnian | | | | | | |
| | 13) | Melaksanakan inspeksi detoksifikasi pada kegiatan pengolahan dan pemurnian | | | | | | |
| | 14) | Melaksanakan inspeksi penanganan tailing pada kegiatan pengolahan dan pemurnian | | | | | | |
| | 15) | Melaksanakan inspeksi penanganan limbah B3 pada kegiatan pengolahan dan pemurnian | | | | | | |
| | j | Inspeksi Pelabuhan | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi alat pelindung diri dan alat keselamatan pada kegiatan di pelabuhan | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi kelaikan dan pemeliharaan pesawat angkat di pelabuhan | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi kelaikan pemadam kebakaran di pelabuhan | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi peralatan keselamatan pelabuhan | | | | | | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi kelengkapan fasilitas keadaan darurat di pelabuhan | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi penanganan limbah di pelabuhan | | | | | | |
| | k | Inspeksi Standarisasi dan Usaha Jasa | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan eksplorasi dan pemasangan tanda batas | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang bawah tanah | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang permukaan | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan tambang semprot | | | | | | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pertambangan kapal keruk/kapal isap produksi | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan fasilitas permukaan | | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pengolahan pemurnian | | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi kesesuaian kompetensi dari pemanfaatan barang dan jasa sesuai klasifikasi dan kualifikasi (peralatan dan tenaga ahli) pada kegiatan pelabuhan | | | | | | |
| | 9) | Melaksanakan inspeksi penggunaan standar | | | | | | |
| | 10) | Melaksanakan inspeksi penggunaan standar kompetensi | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 1 1) | Melaksanakan inspeksi program diklat | | | | | | |
| | 1 | Inspeksi Pascatambang | | | | | | |
| | 1) | Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada kegiatan pascatambang | | | | | | |
| | 2) | Melaksanakan inspeksi hasil reklamasi dan revegetasi pada kegiatan pascatambang | | | | | | |
| | 3) | Melaksanakan inspeksi kestabilan lereng pada kegiatan pascatambang | | | | | | |
| | 4) | Melaksanakan inspeksi pengamanan sisa B3 pada kegiatan pascatambang | | | | | | |
| | 5) | Melaksanakan inspeksi kualitas air pada kegiatan pascatambang | | | | | | |
| | 6) | Melaksanakan inspeksi kualitas tanah pada kegiatan pascatambang | | | | | | |
| | 7) | Melaksanakan inspeksi erosi dan sedimentasi pada kegiatan pascatambang | | | | | | |
| | 8) | Melaksanakan inspeksi pelaksanaan program pengembangan sosial budaya dan ekonomi pada kegiatan pascatambang | | | | | | |
| | 3 | Hasil Inspeksi Rutin | | | | | | |
| | a | Menyimpulkan hasil inspeksi dan menyiapkan bahan diskusi untuk tindakan koreksi | | | | | | |
| | b | Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil inspeksi serta pendaftaran tindakan koreksi dalam Buku Tambang | | | | | | |
| | D | Pemeriksaan atas kecelakaan atau kejadian berbahaya atau kasus lingkungan atau bencana akibat kegiatan usaha pertambangan | | | | | | |
| | | Pemeriksaan Kecelakaan Tambang/ Kejadian Berbahaya/ Kasus Lingkungan | | | | | | |
| | a | Melakukan persiapan pemeriksaan kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya / kasus lingkungan | | | | | | |
| | b | Melaksanakan Pemeriksaan Kecelakaan Tambang / Kejadian Berbahaya/ Kasus Lingkungan | | | | | | |
| | 1) | Membuat sketsa lokasi kecelakaan tambang / kejadian beratraya / kasus lingkungan | | | | | | |
| | 2) | Melakukan rekonstruksi kecelakaan tambang / kejadian berbahaya / kasus lingkungan | | | | | | |
| | 3) | Memeriksa peralatan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang / kejadian berbahaya / kasus lingkungan | | | | | | |
| | 4) | Memeriksa sarana tanggap darurat atau sarana pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang / kejadian berbahaya / kasus lingkungan | | | | | | |
| | 5) | Mengidentifikasi sebaran dampak dari kecelakaan tambang / kejadian berbahaya / kasus lingkungan | | | | | | |
| | 6) | Mengumpulkan dan menelaah data untuk pengujian | | | | | | |
| | 7) | Menyiapkan alat uji dan lembar pengujian | | | | | | |
| | III | PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | | |
| | A | Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 1 | Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/ atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang dipublikasikan | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | 2 | Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/ atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di Perpustakaan | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | 3 | Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang dipublikasikan : | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang | | | | | | |
| | 4 | Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan : | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | 5 | Karya tulis ilmiah populer bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang disebarluaskan melalui media massa | | | | | | |
| | 6 | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | | | | | | |
| | B | Penyusunan buku pedoman atau ketentuan pelaksanaan atau pedoman teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 1 | Menyusun buku pedoman pelaksanaan di bidang Inspeksi Tambang | | | | | | |
| | 2 | Menyusun petunjuk teknis di bidang Inspeksi Tambang | | | | | | |
| | C | Penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 1 | Terjemahan/saduran di bidang ilmu tambang yang dipublikasikan | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | b | Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang | | | | | | |
| | 2 | Terjemahan/saduran di bidang ilmu tambang yang tidak dipublikasikan | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | c | Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan setiap abstrak | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III | | | | | | | | |
| IV | PENUNJANG INSPEKSI TAMBANG | | | | | | | |
| | A | Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 1 | Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 2 | Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan materi pelajaran yang terkait dengan pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| 1 | 2 | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| B | Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah, sebagai : | | | | | | |
| | 1 Pemrasaran | | | | | | |
| | 2 Moderator | | | | | | |
| | 3 Pembahas | | | | | | |
| | 4 Narasumber | | | | | | |
| | 5 Peserta | | | | | | |
| C | Keanggotaan dalam organisasi profesi | | | | | | |
| | Menjadi anggota dalam organisasi profesi instruktur tambang | | | | | | |
| | 1 Pengurus | | | | | | |
| | 2 Anggota | | | | | | |
| D | Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/international | | | | | | |
| | Menjadi anggota dalam organisasi profesi provinsi/nasional/internasional | | | | | | |
| | 1 Tingkat nasional / internasional | | | | | | |
| | a Pengurus | | | | | | |
| | b Anggota | | | | | | |
| | 2 Tingkat provinsi | | | | | | |
| | a Pengurus | | | | | | |
| | b Anggota | | | | | | |
| E | Keanggotaan dalam Tim Penilai | | | | | | |
| | Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional inspektur tambang | | | | | | |
| F | Perolehan Penghargaan/ Tanda Jasa | | | | | | |
| | 1 Tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya | | | | | | |
| | a Tiga puluh (30) tahun | | | | | | |
| | b Dua puluh (20) tahun | | | | | | |
| | c Sepuluh (10) tahun | | | | | | |
| | 2 Gelar kehormatan akademis | | | | | | |
| G | Perolehan ijasah / gelar kesarjanaan lainnya | | | | | | |
| | 1 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas pokok | | | | | | |
| | a Sarjana (S1)/Diploma DIV | | | | | | |
| | b Pasca Sarjana (S2) | | | | | | |
| | c Doktor (S3) | | | | | | |
| | 2 Memperoleh gelar kehormatan akademis | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| V LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya | <p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> |
| VI Catatan Pejabat Pengusul : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya | <p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p> |
| VII Catatan Anggota Tim Penilai : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya | <p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> |
| VIII Catatan Ketua Tim Penilai : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya | <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p> |

ANAK LAMPIRAN 4c
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG AHLI MADYA
 Nomor:

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

| KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| 1. | Nama | : | | | | | |
| 2. | N I P | : | | | | | |
| 3. | Nomor Seri Kartu Pegawai | : | | | | | |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir | : | | | | | |
| 5. | Jenis Kelamin | : | | | | | |
| 6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | : | | | | | |
| 7. | Jabatan Inspektur Tambang / TMT | : | | | | | |
| 8. | Masa Kerja golongan lama | : | | | | | |
| 9. | Masa Kerja golongan baru | : | | | | | |
| 10. | Unit Kerja | : | | | | | |
| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | PENDIDIKAN | | | | | | |
| | A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | | | | | | |
| | Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | | | | | | |
| | 1 Doktor (S3) | | | | | | |
| | 2 Magister (S2) | | | | | | |
| | 3 Sarjana (S1) | | | | | | |
| | B. Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat | | | | | | |
| | Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang di bidang pertambangan mineral dan batubara dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat | | | | | | |
| | 1 Lamanya 960 jam atau lebih | | | | | | |
| | 2 Lamanya antara 641 s.d 960 jam | | | | | | |
| | 3 Lamanya antara 481 s.d 640 jam | | | | | | |
| | 4 Lamanya antara 161 s.d 480 jam | | | | | | |
| | 5 Lamanya antara 81 s.d 160 jam | | | | | | |
| | 6 Lamanya antara 30 s.d 80 jam | | | | | | |
| | 7 Lamanya kurang dari 30 jam | | | | | | |
| II | INSPEKSI TAMBANG | | | | | | |
| | A Perencanaan inspeksi tambang | | | | | | |
| | Memeriksa dan menyempurnakan konsep rencana inspeksi | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | |
|----|---|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B | Penyusunan program Inspeksi tambang | | | | | | |
| | Memeriksa dan menyempurnakan konsep program inspeksi | | | | | | |
| C | Pelaksanaan inspeksi | | | | | | |
| 1 | Melaksanakan Inspeksi Rutin | | | | | | |
| a | Konstruksi | | | | | | |
| 1) | Mengevaluasi perencanaan konstruksi pertambangan | | | | | | |
| 2) | Mengevaluasi pelaksanaan konstruksi pertambangan termasuk komisioning | | | | | | |
| b | Inspeksi Standarisasi dan Usaha Jasa | | | | | | |
| 1) | Melaksanakan pengujian kompetensi tenaga teknis pertambangan | | | | | | |
| 2) | Melaksanakan inspeksi sistem dokumentasi dan kontrol dokumen | | | | | | |
| 3) | Melaksanakan inspeksi kompetensi tenaga kerja | | | | | | |
| 4) | Melaksanakan inspeksi tempat pelatihan dan/ atau tempat uji kompetensi | | | | | | |
| 5) | Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kompetensi tenaga teknis pertambangan | | | | | | |
| c | Inspeksi Pascatambang | | | | | | |
| 1) | Melaksanakan inspeksi pembongkaran fasilitas tambang | | | | | | |
| 2) | Melaksanakan inspeksi pembongkaran fasilitas pengolahan/ pemurnian | | | | | | |
| 3) | Melaksanakan inspeksi pembongkaran fasilitas pelabuhan/ dermaga | | | | | | |
| 4) | Melaksanakan inspeksi kegiatan reklamasi pada pascatambang | | | | | | |
| 5) | Melaksanakan inspeksi daerah yang harus diamankan pada pascatambang | | | | | | |
| d | Inspeksi Sistem Manajemen dan Rencana Kegiatan Pertambangan | | | | | | |
| 1) | Melakukan inspeksi penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan | | | | | | |
| 2) | Melakukan inspeksi penerapan sistem manajemen lingkungan pertambangan | | | | | | |
| 2 | Hasil Inspeksi Rutin | | | | | | |
| | Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan pertambangan mineral dan batubara oleh Inspektur Tambang yang berada di bawah jenjang jabatannya | | | | | | |
| D | Pemeriksaan atas kecelakaan atau kejadian berbahaya atau kasus lingkungan atau bencana akibat kegiatan usaha pertambangan | | | | | | |
| 1 | Pemeriksaan Kecelakaan Tambang/Kejadian Berbahaya/Kasus Lingkungan | | | | | | |
| a | Melaksanakan Pemeriksaan Kecelakaan Tambang /Kejadian Berbahaya/ Kasus Lingkungan | | | | | | |
| 1) | Melaksanakan pertemuan pra-inspeksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya / kasus lingkungan | | | | | | |
| 2) | Mengukur dan menelaah kualitas lingkungan atau melakukan pengujian peralatan yang berhubungan dengan kecelakaan tambang / kejadian berbahaya / kasus lingkungan | | | | | | |
| 3) | Melakukan wawancara saksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya / kasus lingkungan | | | | | | |
| 4) | Menganalisis penyebab kejadian pada pemeriksaan kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya / kasus lingkungan | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--------|-------------|------|--------|---|---|---|---|---|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | | | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | b | Mengolah hasil Pemeriksaan Kecelakaan Tambang/ Kejadian Berbahaya/ Kasus Lingkungan | | | | | | | | | | |
| | | Menyimpulkan hasil pemeriksaan dan menyiapkan bahan diskusi untuk tindakan koreksi pada pemeriksaan kecelakaan tambang / kejadian berbahaya / kasus lingkungan | | | | | | | | | | |
| | | Mempresentasikan dan mendiskusikan hasil pemeriksaan kecelakaan tambang/kejadian berbahaya / kasus lingkungan | | | | | | | | | | |
| | | Menyiapkan dan mendiskusikan bahan tindakan koreksi untuk pendaftaran dalam Buku Tambang | | | | | | | | | | |
| | | 2 Pemeriksaan Kejadian Bencana Pertambangan | | | | | | | | | | |
| | | Melakukan persiapan inspeksi atau pemeriksaan kejadian bencana pertambangan | | | | | | | | | | |
| | | Melaksanakan Pemeriksaan | | | | | | | | | | |
| | | Membuat sketsa lokasi bencana pertambangan | | | | | | | | | | |
| | | Melakukan wawancara saksi pada pemeriksaan kejadian bencana pertambangan | | | | | | | | | | |
| | | Melakukan rekonstruksi kejadian bencana pertambangan | | | | | | | | | | |
| | | Memeriksa peralatan yang berhubungan dengan bencana pertambangan | | | | | | | | | | |
| | | Memeriksa sarana tanggap darurat atau pengelolaan lingkungan yang berhubungan dengan bencana pertambangan | | | | | | | | | | |
| | | Menelaah prosedur kerja standar yang berhubungan dengan bencana pertambangan | | | | | | | | | | |
| | | Mengidentifikasi sebaran dampak dari terjadinya bencana pertambangan | | | | | | | | | | |
| | E | | Pembuatan sketsa, pelaporan dan penyampaian laporan hasil inspeksi tambang | | | | | | | | | |
| 1 | | Menganalisis dan melaporkan hasil inspeksi rutin | | | | | | | | | | |
| 2 | | Menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan reklamasi kegiatan usaha pertambangan | | | | | | | | | | |
| 3 | | Menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan hasil inspeksi pascatambang | | | | | | | | | | |
| 4 | | Menganalisis dan melaporkan hasil pemeriksaan kecelakaan tambang/ kejadian berbahaya / kasus lingkungan | | | | | | | | | | |
| 5 | | Menganalisis dan melaporkan hasil pengujian kelayakan operasi peralatan pertambangan | | | | | | | | | | |
| F | | Pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian rencana, laporan teknis, data studi, dan/ atau kajian teknis untuk pelayanan teknis | | | | | | | | | | |
| | 1 | Menelaah dan mengevaluasi data dan studi/kajian teknis dalam rangka persetujuan atau pengecualian | | | | | | | | | | |
| | 2 | Menelaah dan mengevaluasi dokumen permohonan persetujuan penggunaan teknologi baru dalam pelaksanaan operasi pertambangan | | | | | | | | | | |
| | 3 | Mengevaluasi perencanaan teknik eksplorasi serta penghitungan sumber daya dan cadangan | | | | | | | | | | |
| | 4 | Mengevaluasi perencanaan recovery penambangan | | | | | | | | | | |
| | 5 | Mengevaluasi pendataan sumber daya serta cadangan mineral/batubara yang tidak tertambang | | | | | | | | | | |
| | 6 | Mengevaluasi perencanaan program keselamatan, kesehatan dan/ atau lingkungan kerja | | | | | | | | | | |
| | 7 | Mengevaluasi perencanaan pemeliharaan sarana, prasarana, instalasi dan peralatan pertambangan | | | | | | | | | | |
| | 8 | Mengevaluasi rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan | | | | | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|----|---|---|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 9 | Mengevaluasi perencanaan recovery pengolahan | | | | | | |
| | 10 | Mengevaluasi pendataan dan pengelolaam sisa hasil pengolahan dan/ atau pemurnian | | | | | | |
| G | Pengembangan metode dan telorologi di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | | |
| | 1 | Mengevaluasi dan menganalisis teori/ metoda inspeksi yang ada | | | | | | |
| | 2 | Mengevaluasi dan menganalisis teori/metoda pengujian yang ada | | | | | | |
| | III PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | | | |
| A | Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | | |
| | 1 | Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang dipublikasikan | | | | | | |
| a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | |
| | Dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | |
| 2 | Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di Perpustakaan | | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku | | | | | | |
| b | Dalam bentuk makalah | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3 | Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang dipublikasikan : | | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| b | Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 4 | Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan : | | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku | | | | | | |
| b | Dalam bentuk makalah | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 5 | Karya tulis ilmiah populer bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang disebarluaskan melalui media massa | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 6 | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| B | Penyusunan buku pedoman atau ketentuan pelaksanaan atau pedoman teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | | |
| | 1 | Menyusun buku pedoman pelaksanaan di bidang Inspeksi Tambang | | | | | | |
| 2 | Menyusun petunjuk teknis di bidang Inspeksi Tambang | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| C | Penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | | |
| | 1 | Terjemahan/ saduran di bidang ilmu tambang yang dipublikasikan | | | | | | |
| a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | | |
| | Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang | | | | | | | |
| 2 | Terjemahan/ saduran di bidang ilmu tambang yang tidak dipublikasikan | | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku | | | | | | |
| b | Dalam bentuk makalah | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| c | Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan setiap abstrak | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--|------|--------|-------------|------|--------|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III | | | | | | | |
| IV | PENUNJANG INSPEKSI TAMBANG | | | | | | |
| | A | Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | |
| | 1 | Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | |
| | 2 | Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan materi pelajaran yang terkait dengan pertambangan mineral dan batubara | | | | | |
| | B | Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang pertambangan mineral dan batubara Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah, sebagai : | | | | | |
| | 1 | Pemrasaran | | | | | |
| | 2 | Moderator | | | | | |
| | 3 | Pembahas | | | | | |
| | 4 | Narasumber | | | | | |
| | 5 | Peserta | | | | | |
| | C | Keanggotaan dalam organisasi profesi Menjadi anggota dalam organisasi profesi instruktur tambang | | | | | |
| | 1 | Pengurus | | | | | |
| | 2 | Anggota | | | | | |
| | D | Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/international Menjadi anggota dalam organisasi profesi provinsi/nasional/internasional | | | | | |
| | 1 | Tingkat nasional / internasional | | | | | |
| | a | Pengurus | | | | | |
| | b | Anggota | | | | | |
| | 2 | Tingkat provinsi | | | | | |
| | a | Pengurus | | | | | |
| | b | Anggota | | | | | |
| | E | Keanggotaan dalam Tim Penilai Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional inspektur tambang | | | | | |
| | F | Perolehan Penghargaan/ TandaJasa | | | | | |
| | 1 | Tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya | | | | | |
| | a | Tiga puluh (30) tahun | | | | | |
| | b | Dua puluh (20) tahun | | | | | |
| | c | Sepuluh (10) tahun | | | | | |
| | 2 | Gelar kehormatan akademis | | | | | |
| | G | Perolehan ijasah / gelar kesarjanaan lainnya | | | | | |
| | 1 | Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas pokok | | | | | |
| | a | Sarjana (S I)/Diploma DIV | | | | | |
| | b | Pasca Sarjana (S2) | | | | | |
| | c | Doktor (S3) | | | | | |
| | 2 | Memperoleh gelar kehormatan akademis | | | | | |
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| V LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya | <p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> |
| VI Catatan Pejabat Pengusul : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya | <p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>NIP.</p> |
| VII Catatan Anggota Tim Penilai : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya | <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>NIP.</p> |
| VIII Catatan Ketua Tim Penilai : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya | <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>NIP.</p> |

ANAK LAMPIRAN 4d
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
 DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

DAFTAR USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG AHLI UTAMA

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

| KETERANGAN PERORANGAN | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| NO | | | | | | | |
| 1. | Nama | : | | | | | |
| 2. | N I P | : | | | | | |
| 3. | Nomor Seri Kartu Pegawai | : | | | | | |
| 4. | Tempat dan Tanggal Lahir | : | | | | | |
| 5. | Jenis Kelamin | : | | | | | |
| 6. | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | : | | | | | |
| 7. | Jabatan Inspektur Tambang / TMT | : | | | | | |
| 8. | Masa Kerja golongan lama | : | | | | | |
| 9. | Masa Kerja golongan baru | : | | | | | |
| 10. | Unit Kerja | : | | | | | |
| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | PENDIDIKAN | | | | | | |
| A. | Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | | | | | | |
| | Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar | | | | | | |
| | 1 | Doktor (S3) | | | | | |
| | 2 | Magister (S2) | | | | | |
| | 3 | Sarjana (S1) | | | | | |
| B. | Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/ teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat | | | | | | |
| | Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional di bidang di bidang pertambangan mineral dan batubara dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat | | | | | | |
| | 1 | Lamanya 960 jam atau lebih | | | | | |
| | 2 | Lamanya antara 641 s.d 960 jam | | | | | |
| | 3 | Lamanya antara 481 s.d 640 jam | | | | | |
| | 4 | Lamanya antara 161 s.d 480 jam | | | | | |
| | 5 | Lamanya antara 81 s.d 160 jam | | | | | |
| | 6 | Lamanya antara 30 s.d 80 jam | | | | | |
| | 7 | Lamanya kurang dari 30 jam | | | | | |
| II | INSPEKSI TAMBANG | | | | | | |
| A | Pelaksanaan inspeksi | | | | | | |
| 1 | Melaksanakan Inspeksi Rutin | | | | | | |
| a | Konstruksi | | | | | | |
| 1) | Merumuskan sistem pelaksanaan komisioning instalasi/ peralatan pertambangan | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 2) | Mengevaluasi, menganalisis dan melaporkan hasil komisioning tambang | | | | | | |
| | 3) | Mengevaluasi menganalisis dan melaporkan hasil komisioning pengolahan dan/ atau pemurnian | | | | | | |
| | b | Inspeksi Standarisasi dan Usaha Jasa | | | | | | |
| | 1) | Menganalisis dan mengevaluasi sistem manajemen kontraktor (<i>contractor management system</i>) pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan/ Surat Keterangan Terdaftar | | | | | | |
| | 2) | Menganalisis dan mengevaluasi materi uji kompetensi pengawas kegiatan usaha pertambangan | | | | | | |
| | c | Inspeksi Sistem Manajemen dan Rencana Kegiatan Pertambangan | | | | | | |
| | 1) | Mengevaluasi, menganalisis dan melaporkan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan | | | | | | |
| | 2) | Mengevaluasi, menganalisis dan melaporkan penerapan sistem manajemen lingkungan pertambangan | | | | | | |
| | 3) | Mengevaluasi perencanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan | | | | | | |
| | 4) | Mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen keselamatan pertambangan | | | | | | |
| | 5) | Mengevaluasi perencanaan sistem manajemen lingkungan pertambangan | | | | | | |
| | 6) | Mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen lingkungan pertambangan | | | | | | |
| | B | Pemeriksaan atas kecelakaan atau kejadian berbahaya atau kasus lingkungan atau bencana akibat kegiatan usaha pertambangan | | | | | | |
| | 1 | Pemeriksaan Kecelakaan Tambang/Kejadian Berbahaya/ Kasus Lingkungan | | | | | | |
| | | Mengolah hasil Pemeriksaan Kecelakaan Tambang/ Kejadian Berbahaya/ Kasus Lingkungan | | | | | | |
| | | Memberikan keterangan ahli atau menjadi saksi ahli terkait kasus kecelakaan tambang, kejadian berbahaya, kasus lingkungan dan bencana pertambangan | | | | | | |
| | 2 | Pemeriksaan Kejadian Bencana Pertambangan | | | | | | |
| | a | Melaksanakan Pemeriksaan | | | | | | |
| | 1) | Menyusun rencana strategis pencegahan dan mitigasi bencana pertambangan | | | | | | |
| | 2) | Menganalisis kualitas lingkungan yang berhubungan dengan bencana pertambangan | | | | | | |
| | 3) | Menganalisis dan menjustifikasi penyebab kejadian pada pemeriksaan bencana pertambangan | | | | | | |
| | b | Hasil Pemeriksaan | | | | | | |
| | 1) | Menyimpulkan hasil pemeriksaan/investigasi dan merumuskan tindakan koreksi/ rekomendasi hasil pemeriksaan bencana pertambangan | | | | | | |
| | 2) | Memaparkan dan mendiskusikan rumusan rekomendasi/ tindakan koreksi pada pemeriksaan bencana pertambangan | | | | | | |
| | 3) | Menganalisis data, laporan dan informasi kejadian bencana pertambangan | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | |
|-----|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| C | Pembuatan sketsa, pelaporan dan penyampaian laporan hasil inspeksi tambang | | | | | | |
| | Menganalisis dan melaporkan hasil pemeriksaan bencana pertambangan | | | | | | |
| D | Pengonaran, pengonarsaan dan pengevaluasian rencana, laporan teknis, data studi, dan/atau kajian teknis untuk pelayanan teknis | | | | | | |
| | 1 Menganalisis dan menyimpulkan/ memberikan rekomendasi persetujuan atau pengecualian terhadap studi/ kajian teknis kegiatan pertambangan | | | | | | |
| | 2 Menganalisis dan menyimpulkan/rekomendasi penggunaan teknologi baru pertambangan | | | | | | |
| | 3 Mengevaluasi tingkat keamanan dan keselamatan kegiatan pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 4 Mengevaluasi dan merekomendasikan perencanaan penambangan mineral atau batubara | | | | | | |
| | 5 Mengevaluasi perencanaan pengangkutan mineral atau batubara | | | | | | |
| | 6 Mengevaluasi perencanaan pengolahan dan/ atau pemurnian | | | | | | |
| | 7 Mengevaluasi perencanaan pengelolaan/ pemanfaatan mineral kadar rendah | | | | | | |
| | 8 Mengevaluasi perencanaan pengelolaan/ pemanfaatan batubara kualitas rendah | | | | | | |
| | 9 Mengevaluasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan mineral ikutan | | | | | | |
| | 10 Mengevaluasi perencanaan pengelolaan/pemanfaatan cadangan marjinal | | | | | | |
| | 11 Mengevaluasi perencanaan pengamanan instalasi pertambangan | | | | | | |
| | 12 Menganalisis dan mengevaluasi program reklamasi kegiatan usaha pertambangan skala nasional | | | | | | |
| | 13 Menganalisis dan mengevaluasi program pascatambang kegiatan usaha pertambangan skala nasional | | | | | | |
| E | Pengembangan metode dan teknologi di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 1 Memberikan bimbingan teknis kepada Inspektur Tambang yang berada di bawah jenjang jabatannya | | | | | | |
| | 2 Menemukan teori/ metoda baru untuk pengembangan teknik inspeksi pertambangan | | | | | | |
| | 3 Menemukan teori/metoda baru untuk pengujian peralatan tambang | | | | | | |
| | 4 Menemukan teori/ metoda baru untuk pengembangan teknik pengujian lingkungan kerja pertambangan | | | | | | |
| | 5 Melakukan pembaharuan metode/sistem yang memiliki nilai perbaikan/ penyempurnaan secara nyata terhadap metode/sistem inspeksi tambang yang telah ada | | | | | | |
| | 6 Menerapkan teori/ metode/ sistem baru hasil pengembangan/ penyempurnaan/ pembaharuan sendiri dalam bidang inspeksi tambang | | | | | | |
| III | PENGEMBANGAN PROFESI | | | | | | |
| A | Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 1 Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang dipublikasikan | | | | | | |
| | a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | b Dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |

| NO | UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|----|--|---|------|--------|-------------|------|--------|--|
| | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 2 | Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di Perpustakaan | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | 3 | Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang dipublikasikan : | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah yang diakui oleh instansi yang berwenang | | | | | | |
| | 4 | Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan : | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku | | | | | | |
| | b | Dalam bentuk makalah | | | | | | |
| | 5 | Karya tulis ilmiah populer bidang pelaksanaan inspeksi tambang yang disebarluaskan melalui media massa | | | | | | |
| | 6 | Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah | | | | | | |
| | B | Penyusunan buku pedoman atau ketentuan pelaksanaan atau pedoman teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 1 | Menyusun buku pedoman pelaksanaan di bidang Inspeksi Tambang | | | | | | |
| | 2 | Menyusun petunjuk teknis di bidang Inspeksi Tambang | | | | | | |
| | C | Penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | 1 | Terjemahan/saduran di bidang ilmu tambang yang dipublikasikan | | | | | | |
| | a | Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional | | | | | | |
| | b | Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang | | | | | | |
| 2 | Terjemahan/saduran di bidang ilmu tambang yang tidak dipublikasikan | | | | | | | |
| a | Dalam bentuk buku | | | | | | | |
| b | Dalam bentuk makalah | | | | | | | |
| c | Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan setiap abstrak | | | | | | | |
| | | JUMLAH UNSUR UTAMA I SD III | | | | | | |
| IV | PENUNJANG INSPEKSI TAMBANG | | | | | | | |
| A | Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/ teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | | |
| 1 | Mengajar atau melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | | |
| 2 | Mengajar atau melatih pada pendidikan formal dengan materi pelajaran yang terkait dengan pertambangan mineral dan batubara | | | | | | | |

| UNSUR YANG DINILAI | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|------|--------|-------------|------|--------|
| NO | UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN | ANGKA KREDIT MENURUT | | | | | |
| | | INSTANSI PENGUSUL | | | TIM PENILAI | | |
| | | LAMA | BARU | JUMLAH | LAMA | BARU | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| B | Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang pertambangan mineral dan batubara | | | | | | |
| | Mengikuti seminar/lokakarya/simposium/ pertemuan ilmiah, sebagai : | | | | | | |
| | 1 Pemrasaran | | | | | | |
| | 2 Moderator | | | | | | |
| | 3 Pembahas | | | | | | |
| | 4 Narasumber | | | | | | |
| | 5 Peserta | | | | | | |
| C | Keanggotaan dalam organisasi profesi | | | | | | |
| | Menjadi anggota dalam organisasi profesi instruktur tambang | | | | | | |
| | 1 Pengurus | | | | | | |
| | 2 Anggota | | | | | | |
| D | Keanggotaan dalam organisasi profesi provinsi/nasional/international | | | | | | |
| | Menjadi anggota dalam organisasi profesi provinsi/nasional/internasional | | | | | | |
| | 1 Tingkat nasional / internasional | | | | | | |
| | a Pengurus | | | | | | |
| | b Anggota | | | | | | |
| | 2 Tingkat provinsi | | | | | | |
| | a Pengurus | | | | | | |
| | b Anggota | | | | | | |
| E | Keanggotaan dalam Tim Penilai | | | | | | |
| | Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional inspektur tambang | | | | | | |
| F | Perolehan Penghargaan/ TandaJasa | | | | | | |
| | 1 Tanda kehormatan Satyalencana Karya Satya | | | | | | |
| | a Tiga puluh (30) tahun | | | | | | |
| | b Dua puluh (20) tahun | | | | | | |
| | c Sepuluh (10) tahun | | | | | | |
| | 2 Gelar kehormatan akademis | | | | | | |
| G | Perolehan ijasah / gelar kesarjanaan lainnya | | | | | | |
| | 1 Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas pokok | | | | | | |
| | a Sarjana (S1)/Diploma DIV | | | | | | |
| | b Pasca Sarjana (S2) | | | | | | |
| | c Doktor (S3) | | | | | | |
| | 2 Memperoleh gelar kehormatan akademis | | | | | | |
| JUMLAH UNSUR PENUNJANG | | | | | | | |

| | | |
|-------------|---|--|
| V | LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya | _____ NIP. |
| VI | Catatan Pejabat Pengusul : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya | (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP. |
| VII | Catatan Anggota Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya | _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. |
| VIII | Catatan Ketua Tim Penilai : 1. 2. 3. 4. dan seterusnya | Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP. |

ANAK LAMPIRAN 5
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TELAH
MELAKUKAN KEGIATAN INSPEKSI
TAMBANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN INSPEKSI TAMBANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan perencanaan inspeksi tambang sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 6
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
 PROFESI INSPEKTUR TAMBANG

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI INSPEKTUR TAMBANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi inspektur tambang sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 7
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN KEGIATAN
 PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS
 INSPEKTUR TAMBANG

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTUR TAMBANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas inspektur tambang sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 8
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

| No | Uraian Kegiatan | Tanggal | Satuan Hasil | Jumlah Volume Kegiatan | Angka Kredit | Jumlah Angka Kredit | Keterangan/ bukti fisik |
|-----|-----------------|---------|--------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| dst | | | | | | | |

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
 Atasan Langsung

NIP.....

ANAK LAMPIRAN 9
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
 SURAT PENYAMPAIAN USULAN PENILAIAN
 DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI
 INSPEKTUR TAMBANG

Kepada Yth.
 Pejabat Pengusul Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
 Jabatan Fungsional Inspektur Tambang *)
 Di
 Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Inspektur Tambang dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | PANGKAT/ GOLONGAN RUANG | UNIT KERJA |
|-----|----------|---------|----------------------------|------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| dst | | | | |

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
 Pimpinan Unit Kerja atau paling
 rendah Pengawas yang membidangi
 kepegawaian*)

.....
 NIP.

*) tulis nama jabatannya

ANAK LAMPIRAN 10
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

| I KETERANGAN PERORANGAN | | | | | |
|--|--|---|------|------|--------|
| 1 | Nama | : | | | |
| 2 | NIP | : | | | |
| 3 | Nomor Seri KARPEG | : | | | |
| 4 | Pangkat/Golongan ruang TMT | : | | | |
| 5 | Tempat dan Tanggal lahir | : | | | |
| 6 | Jenis Kelamin | : | | | |
| 7 | Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya | : | | | |
| 8 | Jabatan Fungsional/TMT | : | | | |
| 9 | Masa Kerja Golongan | Lama | : | | |
| | | Baru | : | | |
| 10 | Unit Kerja | : | | | |
| II PENETAPAN ANGKA KREDIT | | | LAMA | BARU | JUMLAH |
| A | Pendidikan Sekolah | | | | |
| B | Angka Kredit Penjenjangan | | | | |
| 1 | UNSUR UTAMA | | | | |
| | a. | Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang inspeksi tambang serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STPPP) | | | |
| | b. | Inspeksi tambang | | | |
| | c. | Pengembangan Profesi | | | |
| | Jumlah Unsur Utama | | | | |
| 2 | UNSUR PENUNJANG | | | | |
| | Kegiatan Penunjang Inspektur Tambang | | | | |
| | Jumlah Unsur Penunjang | | | | |
| Jumlah Pendidikan Sekolah dan Angka Kredit Penjenjangan | | | | | |
| III DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN / PANGKAT/GOLONGAN RUANG | | | | | |

ASLI disampaikan dengan hormat kepada Kepala BKN

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
5. Inspektur Tambang yang bersangkutan; dan
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Nama Lengkap
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

ANAK LAMPIRAN 11
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR TAMBANG

KEPUTUSAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR
TENTANG
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Inspektur Tambang yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Inspektur Tambang jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)

KEDUA :**)
KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 12
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 23 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
 KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
 JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

KEPUTUSAN
 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR
 TENTANG
 PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor tanggal perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Tambang karena;**))
 b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017;
 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari jabatan Inspektur Tambang:
 a. Nama :
 b. NIP :
 c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 d. Jabatan :
 e. Unit Kerja :
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
 pada tanggal

 NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- *) Coret yang tidak perlu
 **) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat pengusulan pemberhentian dari jabatan karena ...
 ***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN 13
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR TAMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Inspektur Tambang jenjang dengan angka kredit sebesar (.....)
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
- 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
- 3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.